

RINGKASAN KEBIJAKAN

Negara Kera

Pembunuhan, Penangkapan,
Perdagangan, dan Konservasi



Maret 2021

Isi disusun dari *Negara Kera: Pembunuhan, Penangkapan, Perdagangan, dan Konservasi* oleh Edelman

arcus
FOUNDATION

Pendahuluan

Seri *Negara Kera* ini membahas berbagai ancaman terhadap konservasi semua spesies kera nonmanusia, yaitu bonobo, simpanse, owa, gorila, dan orang utan, beserta habitatnya (lih. Lampiran I). Volume 1, 2, dan 3 dalam seri ini masing-masing berfokus pada industri ekstraktif, pertanian industri, dan pembangunan infrastruktur.

Volume 4 membahas pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan kera, yang mencakup perdagangan kera hidup, konsumsi daging satwa liar oleh manusia, dan berbagai pemanfaatan bagian tubuh kera. Perburuan kera liar yang dilakukan demi memenuhi pemanfaatan ini berdampak parah pada viabilitas populasi kera dan pada ketahanan ekosistem tempat satwa tersebut ditemukan. Perdagangan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya penularan penyakit antara manusia dan kera, serta keetisan yang dipertanyakan dalam pemenuhan kesejahteraan kera yang diselamatkan.

Pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan kera ini didorong oleh adanya ketersediaan senjata, kerawanan pangan, kurangnya opsi mata pencaharian, oportunisme yang berkaitan dengan faktor ekonomi, buruknya tata kelola, dan keterjangkauan populasi/habitat dengan pelaku/manusia. Perluasan industri dan infrastruktur di dekat habitat kera dan keberadaan berbagai platform online memungkinkan terjadinya perdagangan ini. Perdagangan kera kemungkinan akan terus terjadi akibat adanya sistem kepercayaan budaya dan persepsi tentang status sosial ekonomi yang berkaitan dengan konsumsi, kepemilikan, dan pemanfaatan kera beserta produk yang berasal dari satwa ini.

Dokumen ini merangkum temuan utama dari *Negara Kera* Volume 4 dan menyajikan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan yang tengah berupaya mencapai keseimbangan terbaik antara konservasi kera, perkembangan ekonomi, dan masalah sosial. Karena perdagangan kera ini begitu kompleks dan mencakup skala lokal, nasional, dan inter-

nasional, maka para pemangku kepentingan diminta untuk melakukan intervensi di setiap titik yang ada di sepanjang rantai perdagangan ilegal ini.

Rekomendasi ini meliputi pengembangan kerangka hukum dalam negeri yang efektif, memberlakukan sanksi yang mencegah terjadinya kegiatan kriminal, mendukung kerangka kebijakan internasional, dan menjamin diberlakukannya peraturan yang melindungi kesejahteraan kera dalam kurungan. Selain itu, para pemangku kepentingan harus memperkuat penegakan hukum yang ditargetkan di sepanjang rantai perdagangan, terutama pada transportasi dan pasar konsumen. Para pemangku kepentingan juga harus mengatur pelaku sektor swasta, misalnya pengembang industri, dan menutup pasar online yang digunakan untuk memfasilitasi perdagangan satwa liar.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dan memastikan agar mereka mendapat manfaat dari konservasi kera, yang membutuhkan pemahaman akan konteks budaya dan pemberian insentif ekonomi. Para pemangku kepentingan juga harus berupaya mengurangi permintaan akan produk ilegal di pasar konsumen dalam negeri maupun luar negeri dengan melaksanakan upaya peningkatan kesadaran, strategi perubahan perilaku, dan pendidikan.

Gambaran Umum mengenai Perdagangan Kera

Pembunuhan, Penangkapan, dan Perdagangan

Pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan kera liar berdampak negatif secara langsung pada status konservasi populasi kera tersebut. Perburuan telah berkembang menjadi faktor penentu utama kelestarian kera di alam liar (Brockelman dan Geissmann, 2019). Meskipun faktor pendorong perdagangan kera dan solusinya memiliki banyak kesamaan



Perburuan, konsumsi, dan perdagangan daging satwa liar yang tak terpisahkan dari masyarakat pedesaan di tropika. Kaki dan tangan gorila barat yang akan diasapi, agar tidak rusak hingga sampai di pasar. © Jabruson (www.jabruson.photoshelter.com)

dengan perdagangan spesies satwa liar lainnya, pembunuhan dan penangkapan kera tetap menjadi perhatian khusus karena satwa ini memiliki perasaan, hubungan sosial yang kompleks, dan hubungan genetik yang erat dengan manusia. Banyak populasi kera yang jumlahnya menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir, dan kini hanya ditemukan dalam kelompok-kelompok kecil yang terfragmentasi. Sangat sulit bagi populasi kera untuk kembali pulih dalam populasi yang sehat dan mampu terhindar dari kepunahan karena spesies ini memiliki tingkat reproduksi yang rendah dan jarak antarkelahiran yang panjang (Cheyne, 2010; Furuichi *et al.*, 1998; Sugiyama dan Fujita, 2011).

Semua spesies kera, kecuali owa hoolock timur, termasuk dalam kategori 'genting' (*endangered*/EN) atau 'kritis' (*critically endangered*/CN) dalam Daftar Merah (Red List) International Union for Conservation of Nature (IUCN). Dengan diakuinya status rentan spesies kera, maka spesies ini pun dilindungi oleh Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam Punah (CITES). Perjanjian global ini melarang segala bentuk perdagangan kera secara internasional dengan mencantumkan daftar semua spesies kera dalam Lampiran I. Perlindungan dalam negeri diatur oleh masing-masing pemerintah dan detailnya bervariasi di negara-negara wilayah jelajah kera, tetapi perburuan kera tetap dianggap ilegal di semua negara habitat ini (Meijaard *et al.*, 2010b).

Dalam dokumen ini, istilah perburuan dan perburuan liar merujuk pada pembunuhan kera (yang produknya kemungkinan diperdagangkan atau mungkin saja tidak) dan penangkapan satwa ini dari alam liar untuk perdagangan kera hidup. Perburuan merupakan langkah pertama dalam rantai perdagangan ilegal yang dapat mencakup kera hidup, daging kera, atau bagian tubuh kera yang telah dibunuh. Perdagangan (*trafficking*) dalam dokumen ini adalah berbagai kegiatan yang melanggar hukum nasional ataupun internasional dan terjadi di sepanjang rantai perdagangan ilegal satwa liar.

Hal lain yang dibahas dalam bagian ini adalah tiga jenis perdagangan kera (perdagangan daging satwa liar, bagian tubuhnya, dan satwa hidup) yang semuanya diawali dengan adanya perburuan kera di alam liar (Coad *et al.*, 2019). Belum diketahui bentuk perdagangan mana yang merupakan ancaman terbesar bagi populasi kera di dunia. Oleh karena itu, semua bentuk perdagangan harus dipahami dan ditangani oleh para pembuat kebijakan.

Perdagangan Daging Satwa Liar

Perdagangan daging satwa liar mencakup pembunuhan kera yang diikuti dengan penjualan daging kera segar atau asap untuk dikonsumsi manusia. Daging kera dikonsumsi di negara wilayah jelajah kera dan juga diperdagangkan secara internasional. Adanya konsumsi daging kera dalam negeri di berbagai negara wilayah jelajah kera berkaitan dengan ketersediaan, harga, dan preferensi rasa, sedangkan daya beli dikaitkan dengan status sosial ekonomi, khususnya di daerah perkotaan (Nijman, 2005). Secara internasional, konsumsi daging kera dengan harga yang jauh lebih tinggi dikaitkan dengan budaya dan persepsi akan kebanggaan dan status.

Perburuan satwa liar untuk diambil dagingnya tidak hanya dialami kera dan perburuan ini terjadi di berbagai belahan dunia yang bergantung pada satwa liar sebagai sumber protein. Di pasar-pasar di Afrika, proporsi monyet dan kera dalam penjualan daging satwa liar jarang sekali lebih dari 20% dari total (Cawthorn dan Hoffman, 2015; Robinson dan Bennett, 2004). Terkadang perburuan kera dan owa di Asia Tenggara, secara khusus dilakukan untuk diambil dagingnya, meski belum banyak informasi yang tersedia mengenai pasar ini dan jumlah daging yang dikonsumsi (Harrison *et al.*, 2016; Stokes, 2017).

Perdagangan Bagian Tubuh Kera

Perdagangan bagian tubuh kera mengikuti pola perdagangan yang sama dengan perburuan daging satwa liar. Rantai pasoknya dimulai di hutan, pemburu memberikan kepada pedagang yang akan menyelundupkan produk kera ke tujuan akhir di dalam negeri ataupun luar negeri (Brown, 2006). Pemanfaatan bagian tubuh kera di dalam negeri sering kali dikaitkan dengan sistem kepercayaan. Di beberapa tempat, misalnya, kepemilikan satwa ini diyakini dapat memberikan perlindungan, memiliki kekuatan penyembuhan, atau memberikan kekuatan (CITES dan GRASP, 2006; Nforngwa, 2017; Zhou *et al.*, 2005). Di seluruh dunia, ada indikasi bahwa bagian tubuh kera, seperti tengkorak, dihargai sebagai trofi dan tulang kera banyak diminati untuk digunakan dalam pengobatan tradisional (Nforngwa, 2017). Skala perdagangan bagian tubuh kera tidak tercatat dengan baik, tetapi pengamatan oleh Last Great Ape Organization menunjukkan bukti adanya peningkatan minat terhadap produk satwa ini. Sebagai contoh, pada tahun 2015, diperkirakan ada 900 tengkorak kera yang diperdagangkan di Afrika (Clough dan May, 2018).

Perdagangan Kera Hidup

Penangkapan kera liar hidup secara ilegal umumnya menargetkan bayi kera untuk dijual di pasar dalam negeri ataupun internasional. Perdagangan kera hidup ini didorong oleh permintaan akan kera untuk ditampilkan di pameran, dipelihara sebagai hewan peliharaan eksotis, atau digunakan sebagai hewan hiburan (Clough dan Mei, 2018; Greengrass, 2015). Tujuannya mencakup sirkus, rumah pribadi, taman safari dan kebun binatang, serta fasilitas pelatihan yang melayani industri hiburan termasuk periklanan, film, pemasaran, dan televisi. Perdagangan kera hidup mencakup rantai kegiatan ilegal yang kompleks yang dapat meliputi pemalsuan izin atau penyelundupan kera dalam pengiriman hewan yang legal (Stiles, 2016). Penyelundup yang memperdagangkan kera hidup juga diketahui menggunakan pesawat sewaan, komersial, atau pribadi (Stiles, 2016).

Karena perdagangan kera hidup menarik perhatian media global, perdagangan ini lebih dipahami daripada bentuk perdagangan lainnya, dan upaya yang lebih besar tengah dilakukan untuk mengatasinya (Shukman dan Piranty, 2017). Jumlah kera yang ada di suaka dan yang tercantum pada catatan penyitaan kera dari perdagangan ilegal menunjukkan perkiraan besarnya skala permasalahan ini (Stiles *et al.*, 2013). Antara tahun 2005 hingga 2011, misalnya, para peneliti percaya bahwa sekurangnya ada 3.000 kera besar diambil dari alam liar setiap tahunnya, dari jumlah tersebut simpanse diperkirakan sekitar dua pertiganya. Karena simpanse memiliki populasi yang terbesar dan sebaran terluas dari semua kera di Afrika, maka simpanse yang paling terdampak dalam perburuan ini. Selain itu, berdasarkan penelitian yang ada, diperkirakan sekurangnya 500 orang utan, 400 gorila, dan 150 bonobo ditangkap setiap tahunnya. Namun demikian mengingat sifat pembunuhan, penangkapan dan perdagangan kera yang rahasia, penelitian tersebut cenderung menilai jumlah kera yang sebenarnya terlalu rendah.

Akan tetapi jumlah kera hidup yang diambil hanya mewakili sebagian kecil dari dampak bentuk perdagangan ini terhadap populasi kera. Karena target perdagangan kera hidup ini adalah kera muda, maka dampak yang terjadi kemungkinan besar jauh lebih tinggi terhadap komunitas kera yang menjadi target tersebut. Bagi setiap individu kera yang ditangkap, banyak di antaranya yang kemungkinan terbunuh dalam proses perburuan. Hal ini karena sebagian besar kera membentuk kelompok sosial dengan ikatan yang kuat. Pengambilan bayi kera akan menyebabkan pembunuhan kera dewasa yang berupaya melindunginya.



Sejak tahun 1990-an, semakin banyak pemanfaatan orang utan dalam pariwisata dan pertunjukan hiburan di Thailand. Satu iklan online 'pertunjukan tinju' orang utan menjanjikan pengunjung aksi lucu kera yang mengenakan pakaian petinju dan 'menarik perhatian' penonton 'dengan bakat matematikanya'. Pada akhir tahun 2003, tes DNA membuktikan lebih dari separuh orang utan di Safari World diselundupkan dari Indonesia. Safari World. © PEGAS

Skala dan Dampak

Karena habitat kera utamanya berada di hutan terpencil, yang penegakan hukum atau kapasitas pemantauan lingkungannya kerap kali terbatas, maka dampak keseluruhan dari pembunuhan, penangkapan, dan penangkaran kera sangat sulit untuk diukur. Bukti yang ada menunjukkan bahwa permintaan akan kera dan produk kera telah meningkat baru-baru ini (yang mendorong lebih banyak perburuan) dan berdampak negatif terhadap populasi kera (Meijaard *et al.*, 2010b; Spehar *et al.*, 2018; Stiles *et al.*, 2013; Turvey *et al.*, 2018). Di seluruh benua Asia dan Afrika, antara tahun 2005 hingga 2011 diperkirakan lebih dari 22.000 kera besar yang dibunuh atau ditangkap untuk memasok perdagangan ilegal satwa liar (Stiles *et al.*, 2013). Pada tahun 2015–2016, pusat penyelamatan di Asia Tenggara menampung 747 owa, sehingga peluang untuk perdagangan spesies ini pun berkurang (Kheng *et al.*, 2017; Nijman, Yang, Martinez dan Shepherd, 2009; Smith *et al.*, 2018).

Perburuan menjadi Ancaman terhadap Kelangsungan Hidup Kera

Dampak langsung utama dari perburuan kera adalah berkurangnya populasi kelompok yang terdampak, yang kemudian dapat menyebabkan kepunahan lokal (Tranquilli *et al.*, 2012). Selain kematian seketika pada individu kera, perburuan juga dapat men-

gakibatkan cedera pada individu lainnya. Cedera ini dapat mengurangi keberhasilan perkembangbiakan (*breeding*), masa hidup, dan kesejahteraan psikologis kera. Kelompok gorila dan kera besar lainnya di Afrika juga dapat mengalami dampak sosial dari perburuan. Contohnya, pembunuhan gorila jantan punggung perak dapat mendorong kehancuran kelompok dan pembunuhan bayi gorila oleh gorila jantan lainnya (Kalpers *et al.*, 2003; Robbins *et al.*, 2013; Watts, 1989).

Kelangsungan hidup kera di alam liar dapat dipengaruhi oleh tingkat perburuan yang mempengaruhi populasi (Brockelman dan Geissmann, 2019). Bahkan tekanan perburuan yang rendah sekalipun dapat menyebabkan penurunan yang parah pada populasi kera, karena sejarah hidup kera yang lama dengan tingkat reproduksinya yang rendah (Cheyne, 2010; Furuichi *et al.*, 1998; Sugiyama dan Fujita, 2011). Penelitian yang ada menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah kematian satwa ini berdampak pada kelangsungan hidup suatu populasi kera (Carlsen *et al.*, 2012; Fan *et al.*, 2013; Smith *et al.*, 2018; Turvey *et al.*, 2015). Sebagai contoh, analisis viabilitas yang dilakukan terhadap simpanse barat mengungkapkan bahwa populasi yang kurang dari 100 individu setidaknya memiliki 50% risiko kepunahan selama 100 tahun ke depan bahkan jika mereka mengalami kehilangan individu sebesar 3% setiap tahunnya (Carlsen *et al.*, 2012). Pada akhirnya, populasi yang terdampak akan berada di bawah ambang batas tertentu yang membuat kawin sedarah, kegagalan reproduksi, sehingga kepunahan tak terelakkan lagi.

Dampak Ekosistem

Sebagai mamalia besar yang tinggal di hutan, kera dapat menjadi spesies indikator untuk kesehatan secara menyeluruh ekosistem yang dihuninya dan memberikan *umbrella effect* (efek perlindungan) yang besar bagi keanekaragaman hayati. Kera besar pada umumnya merupakan penyebar biji besar (>1 cm) yang efisien, yang sulit disebarkan oleh hewan-hewan yang lebih kecil, dan mereka juga dapat membatasi reproduksi tumbuhan, sehingga membantu menjaga keseimbangan sistem alam (Leighton, 1993; Tutin *et al.*, 1991). Kera juga merupakan representasi satwa langka dan ikonik untuk alam yang menarik banyak sekali minat global, sehingga dapat membantu menginspirasi perlindungan lingkungan yang lebih luas. Upaya melindungi kera memberikan manfaat bagi habitatnya, satwa liar lainnya yang ada di dalam habitat tersebut, dan jasa ekosistem yang diberikan oleh alam kepada manusia.

Hutan tropis yang dihuni kera merupakan sumber makanan, obat, tempat tinggal, dan air yang sangat penting bagi masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya. Selain itu, hutan-hutan ini juga kaya akan keanekaragaman hayati dan dapat menyimpan karbon, yang penting bagi kesejahteraan semua manusia. Meskipun dampak jangka panjang akibat pengambilan kera dari ekosistem hutan belum sepenuhnya diketahui, para ilmuwan mengantisipasi bahwa hilangnya kera-kera ini dapat menyebabkan berkurangnya keanekaragaman tumbuhan dan mengubah struktur habitat (Beaune, 2015; Nuñez-Iturri dan Howe, 2007; Petre *et al.*, 2013). Selain itu, meningkatnya keberadaan manusia di hutan meningkatkan risiko masuknya spesies bukan asli yang dapat mengancam ekosistem (Karesh *et al.*, 2005; Nijman, 2010; Westphal *et al.*, 2008).

Penularan Penyakit

Mengingat kesamaan genetik antara manusia dan kera liar, maka kontak antara manusia dan kera menimbulkan bahaya. Karena patogen dari manusia dapat sangat membahayakan kera, maka penularan penyakit menjadi ancaman bagi konservasi populasi kera liar (Dunay *et al.*, 2018). Demikian pula, kera hidup dan bangkai kera dapat menularkan patogen zoonosis kepada manusia. Wabah penyakit menular, misalnya virus-virus yang berkaitan dengan penyakit pernapasan, Ebola, dan AIDS, awalnya berasal dari kera (Hahn *et al.*, 2000; Hoppe *et al.*, 2015; Richard *et al.*, 2016). Sebagaimana disaksikan selama pandemi COVID-19 di dunia, patogen zoonosis dari kera dan satwa liar lainnya menjadi ancaman yang serius dan ancaman global bagi kesehatan manusia (Gillespie, Nunn, dan Leendertz, 2008). Membiarkan kera di alam liar dan menjauhkannya dari manusia harus dilakukan demi keselamatannya serta keselamatan orang-orang di seluruh dunia. Volume kelima seri *Negara Kera* akan membahas kesehatan kera secara terperinci, termasuk penularan penyakit.

Pertimbangan Etis

Perdagangan kera hidup memunculkan pertanyaan etis terkait penanganan individu kera yang telah diselamatkan atau disita dari perdagangan ilegal. Sebagian besar spesies kera tidak dapat dengan mudah atau dengan aman dikembalikan ke alam liar setelah terhabituasi dengan manusia dan terpapar patogen manusia. Di saat yang sama, melakukan eutanasia pada kera tidaklah etis ataupun legal, kecuali kera tersebut menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau mengalami rasa sakit yang luar biasa. Oleh karena itu, pendekatan yang paling etis adalah merawat kera yang berada dalam kurungan secara manusiawi hingga reintroduksi ke alam liar dapat dilakukan, jika

KOTAK 1

Kesenjangan Pengetahuan

Mengingat tidak banyak studi pemantauan jangka panjang yang terperinci mengenai dampak pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan pada kera, maka kesenjangan informasi yang ada menjadi kendala utama dalam pembuatan kebijakan (Booker and Roe, 2017; Rovero *et al.*, 2015). Oleh karena itu, bukti mengenai efektivitas relatif berbagai strategi yang dilakukan untuk melindungi kera dari perburuan masih terbatas.

Untuk memahami sepenuhnya dampak, skala, dan faktor pendorong yang mendasari pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan kera, diperlukan investasi dalam pengumpulan dan analisis data lainnya. Para ilmuwan dan peneliti dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, dan akademisi harus meningkatkan sumber daya yang didedikasikan untuk memantau dampak intervensi. Pemerintah dapat mendukung upaya ini dengan cara memberikan akses ke habitat kera dan mendorong kementerian terkait untuk bekerja sama dalam studi terkemuka tersebut. Karena penelitian baru telah dipublikasikan dan pengetahuan lebih lanjut telah tersedia, hal ini harus diberitahukan dalam pembuatan keputusan dan pengembangan strategi konservasi kera.

memungkinkan. Jika reintroduksi tidak dapat dilakukan, kera harus diberikan perawatan berkualitas tinggi dan penuh kasih sayang selama hidupnya. Karena sebagian besar suaka kera sudah mencapai kapasitasnya, dan memerlukan biaya yang mahal untuk mengelolanya secara bertanggung jawab, maka dukungan dan sumber daya yang lebih besar untuk kesejahteraan kera dalam kurungan wajib diberikan secara etis.

Faktor Pendorong

Tata Kelola yang Buruk dan Ketersediaan Senjata

Jika korupsi terus merajalela, penegakan hukum yang dilakukan tidak memadai, dan komitmen politik masih kurang, maka perdagangan kera dapat berkembang pesat. Terbatasnya kesadaran akan hukum dan sanksinya yang kurang memberikan efek jera, disertai dengan mudahnya akses ke pasar juga mendorong terjadinya pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan kera (Harrison *et al.*, 2015). Pada wilayah dengan tata kelola yang lemah, para pejabat mungkin akan rentan terhadap penyuapan, tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menegakkan hukum, atau enggan menangkap pelaku yang berpengaruh dan memiliki hubungan baik dengannya (Lindsey *et al.*, 2012; Rodriguez *et al.*, 2019). Keseriusan dari perdagangan satwa liar ini tidak boleh diremehkan begitu saja karena hal ini berkaitan dengan jaringan pelaku kejahatan transnasional dengan rute yang dibangun untuk menyelundupkan barang-barang ilegal lainnya, termasuk obat-obatan dan senjata api (Cook, Roberts, dan Lowther, 2002).

Alat dan teknologi yang canggih seperti kamera malam (*night vision*) dan kamera termal, senapan dan perangkap, dan bahkan helikopter digunakan untuk memburu satwa liar yang statusnya kritis (Coad *et al.*, 2019). Walaupun beberapa kera ditangkap akibat jerat yang dipasang sembarangan di seluruh area yang luas dalam perburuan subsisten untuk menangkap satwa, sebagian besar kera dibunuh dengan sengaja menggunakan senjata api (Fa, Ryan, dan Bell, 2005). Selama senjata jarak jauh seperti senapan masih tersedia, maka tekanan perburuan terhadap kera pun terus meningkat (Marshall *et al.*, 2006; Meijaard *et al.*, 2010a).



Faktor pendorong ekonomi maupun geografi memiliki keterkaitan dengan konsumsi daging satwa liar, masyarakat termiskin di wilayah pedesaan yang mengonsumsi paling banyak daging satwa liar. Sementara di wilayah perkotaan, masyarakat terkaya yang mengonsumsi daging satwa liar yang terbanyak. Daging satwa liar dan bagian tubuhnya yang disita, Lomié, Kamerun. © LAGA dan The EAGLE Network

Ketahanan Pangan dan Kurangnya Opsi Mata Pencarian

Faktor pendorong signifikan perdagangan ilegal satwa liar adalah hasrat mendapatkan keuntungan, dan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan tingkat pengangguran yang tinggi atau pendapatan yang rendah kemungkinan besar akan turut berpartisipasi dalam perdagangan ini (Duffy dan St John, 2013; Duffy *et al.*, 2016; Harrison *et al.*, 2015). Peluang ekonomi yang terbatas dan kurangnya sumber protein yang memadai dengan harga terjangkau tercatat menjadi faktor yang turut berkontribusi, selain konflik, ketidakamanan, dan kurangnya opsi mata pencarian (de Merode dan Cowlshaw, 2006; Kümpel *et al.*, 2010).

Beberapa rumah tangga yang berada di negara wilayah jelajah kera bergantung pada daging satwa liar sebagai satu-satunya sumber protein hewani (Hickey *et al.*, 2016). Beberapa kera terbunuh atau mengalami cacat permanen karena ketidaksengajaan, misalnya ketika pemburu subsisten tidak sengaja menjebak kera dengan jerat yang ditujukan untuk satwa lain. Karena produk kera dihargai tinggi di pasar gelap dan dapat menjadi sumber penghasilan, maka faktor pendorong ekonomi pun kerap kali ditemukan bersamaan dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar (Duffy dan St John, 2013; Harrison *et al.*, 2015; TRAFFIC, 2008).

Kedekatan

Seiring dengan meningkatnya populasi manusia dan adanya perambahan lebih jauh hingga ke dalam habitat kera, maka

manusia dan kera pun semakin bersaing untuk memperoleh sumber daya yang sama hingga menimbulkan konflik satu sama lain (Campbell-Smith *et al.*, 2010; Nijman, 2009; Stiles *et al.*, 2013; Utami-Atmoko *et al.*, 2017). Kera diketahui kadang kala merusak tanaman pertanian yang ditanam di dalam atau dekat wilayah jelajahnya dan tercatat beberapa kasus simpanse yang menyerang dan membunuh manusia, terutama anak-anak (Hockings dan Humle, 2009; Hockings dan McLennan, 2012).

Orang-orang terkadang memburu kera saat mereka memasuki perkebunan atau desa demi mencegah atau melakukan tindak balas akibat penyerangan terhadap tanaman pangan, membela diri, atau karena alasan ketakutan akan keamanan pribadi atau masyarakat (Ancrenaz, Dabek, dan O'Neil, 2007; Baker, MilnerGulland, dan Leader- Williams, 2012; Davis *et al.*, 2013; Meijaard *et al.*, 2011). Jenis perburuan ini sebagian besar terjadi di lanskap pertanian dan hutan yang tidak dilindungi. Di kawasan ini, keterlibatan dalam perdagangan kera sering kali bersifat oportunis, bukan terorganisasi.

Perluasan Industri dan Infrastruktur

Sebagaimana dibahas pada volume *Negara Kera* sebelumnya, kera berada di bawah berbagai tekanan antropogenik yang beberapa di antaranya berkaitan dengan konversi pertanian industri, pembangunan infrastruktur, dan eksploitasi minyak dan gas. Perluasan industri hingga ke dalam habitat kera yang berdampak langsung terhadap kera, misalnya perubahan perilaku, gangguan, hilangnya habitat, cedera dan kematian, serta

dampak tidak langsung, misalnya penyakit, perburuan, dan polusi, yang diakibatkan oleh semakin banyaknya permukiman manusia. Proyek industri menarik orang-orang yang mencari peluang ekonomi, dan jaringan infrastruktur linier memfasilitasi aksesnya menuju wilayah terpencil (Hickey *et al.*, 2013; Laurance *et al.*, 2008; Maisels *et al.*, 2013). Adanya infrastruktur juga memudahkan pengangkutan produk ilegal dari hutan terpencil ke pasar di kota.

Ada korelasi yang kuat dan tercatat dengan baik antara berpindahnya permukiman manusia (ke wilayah yang sebelumnya terisolasi, lalu menjadi wilayah pembangunan industri dan infrastruktur) dan perburuan satwa liar (Auzel dan Wilkie, 2000; Lanjouw, 2015; Poulsen *et al.*, 2009; White dan Fa, 2014; Wilkie dan Carpenter, 1999; Wilkie *et al.*, 2000). Khusus untuk populasi kera, menurunnya kelimpahan dan kepadatan populasi kera yang habitatnya berdekatan dengan jalan dan permukiman manusia diakibatkan oleh tekanan perburuan seiring dengan meningkatnya akses manusia terhadap habitat kera (Espinosa, Branch, dan Cueva, 2014; Fa, Ryan, dan Bell, 2005; Hickey *et al.*, 2013; Kuehl *et al.*, 2009; Poulsen, Clark, dan Bolker, 2011). Selain itu, permukiman manusia di dalam atau di dekat habitat kera juga meningkatkan risiko kematian akibat konflik antara manusia dan kera (Poulsen *et al.*, 2009).

Budaya dan Kepercayaan

Sikap dan perilaku terhadap satwa liar berbeda-beda antar-pribadi maupun antarmasyarakat. Bagi beberapa kelompok, kera dipandang sebagai hewan suci, pelindung, reinkarnasi leluhur, ataupun totem (CCFU, 2018). Di beberapa lokasi, tabu secara budaya atau agama melarang perburuan dan penjualan

bagian tubuh kera untuk konsumsi, upacara, jimat, dan obat tradisional. Selain itu, hadirnya peneliti atau petugas penegak hukum di beberapa kawasan lindung telah membatasi pemanfaatan produk kera (Campbell *et al.*, 2011; Oates *et al.*, 2007; Tagg *et al.*, 2015).

Di lokasi lain, kepercayaan dan praktik budaya diketahui mendorong adanya perdagangan kera, meskipun data spesifik untuk negara wilayah jelajah kera dan pasar internasional masih terbatas. Ada banyak orang yang menggunakan obat tradisional untuk menyembuhkan dan mengobati penyakit umum. Sebagai contoh, di Laos, tulang primata yang mungkin juga berasal dari owa digunakan untuk menyembuhkan demam dan kencing nanah (gonore) (Duckworth, 2008).

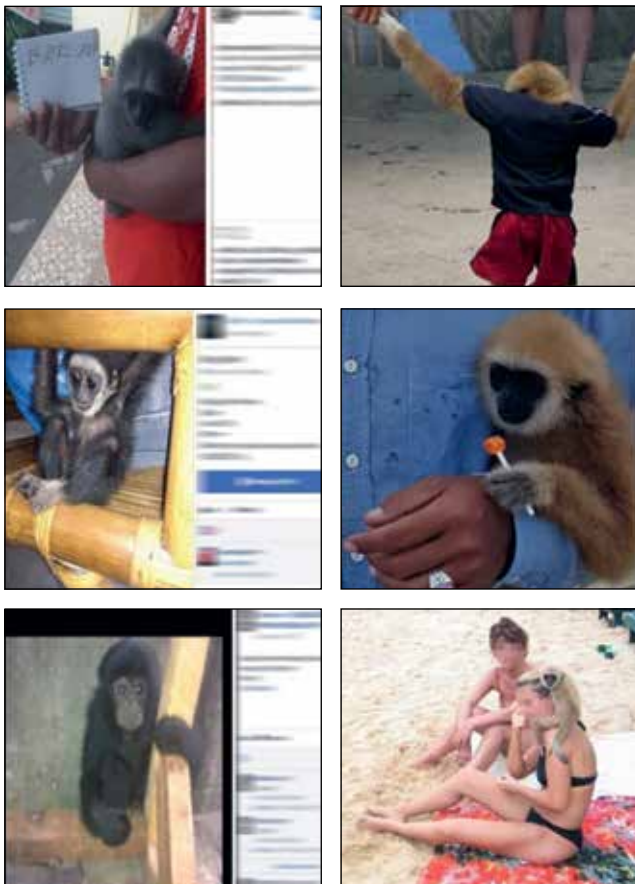
Di Kamerun, adanya kepercayaan bahwa bagian tubuh kera memiliki khasiat dan kekuatan pengobatan, ritual, atau bahkan mistis telah mendorong permintaan akan bagian tubuh satwa ini. Demikian pula halnya, kepercayaan bahwa mengonsumsi produk gorila dapat memberikan kekuatan bagi orang yang memakannya telah memunculkan praktik membakar dan menggiling tulang gorila untuk membuat obat kuat tradisional (Clough dan May, 2018). Selain itu, penggunaan totem kera telah tercatat di beberapa wilayah Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Gabon, Liberia, Nigeria, Tanzania, dan Uganda (Drani dan Infield, 2014).

Status

Di beberapa tempat dan konteks budaya, kepemilikan kera sebagai hewan peliharaan atau konsumsi daging kera dikaitkan dengan status sosial ekonomi yang tinggi di dalam maupun di luar negara-negara wilayah jelajah kera. Ironisnya, daging satwa liar kerap dikonsumsi oleh masyarakat termiskin di daerah pedesaan, tetapi orang terkaya di daerah perkotaan menganggapnya sebagai barang mewah yang disajikan pada acara-acara khusus untuk memamerkan kekayaan atau mengesankan tamu (Brashares *et al.*, 2011). Permintaan internasional sering dikaitkan dengan masyarakat diaspora, dan ekspor daging satwa liar telah tercatat di Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, dan Asia (Chaber *et al.*, 2010; Clough dan May, 2018). Tingkat konsumsi daging kera di negara bukan habitat kera kemungkinan besar lebih rendah daripada konsumsi di negara habitat kera (Brown, Fa, dan Gordon, 2007; Harris dan Karammedovic, 2009). Karena daerah perkotaan yang maju memiliki akses yang melimpah terhadap sumber protein alternatif, termasuk pasokan produk daging ternak, maka daging satwa liar tidak lagi dibutuhkan untuk ketahanan pangan konsumen perkotaan ini (Wilkie *et al.*, 2016).

Perdagangan Online

Pada beberapa tahun terakhir, kegiatan perdagangan satwa liar baik legal maupun ilegal telah bergeser dari pasar tradisional terbuka ke platform media sosial dan forum online (IFAW, 2008; 2014; Kramer *et al.*, 2017). Platform ini memungkinkan pedagang untuk mengendalikan akses terhadap forum yang ada, sehingga penegakan hukum dapat dihindari (Krishnasamy dan Stoner, 2016). Penjual dan pembeli dapat terlibat dalam diskusi pribadi secara online yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur pertukaran ilegal (Smith dan Cheyne, 2017; Stiles, 2016). Adanya penggunaan kelompok yang tertutup dan forum yang dilindungi kata sandi mempersulit dilakukannya pemantauan terhadap tingkat perdagangan online kera atau evaluasi terhadap ancaman yang ditimbulkannya kepada populasi (IFAW, 2014; Krishnasamy dan Stoner, 2016).



Penjualan owa di media sosial (kiri) serta "foto bersama satwa liar" bagi wisatawan asing di sebuah pantai di Thailand (kanan). Sumber: tangkapan layar tahun 2017 dan 2018

Terlepas dari tantangan ini, penjualan kera telah tercatat pada platform media sosial yang terbuka maupun yang tertutup (Hastie dan McCrea-Steele, 2014; Phassaraudomsak dan Krishnasamy, 2018; Stiles, 2016). Sebagai contoh, investigasi yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan adanya 11 akun Instagram dan 10 grup Facebook yang menampilkan iklan owa yang berasal dari Indonesia dan Malaysia (Cheyne, tanpa tahun). Pada bulan April hingga Juni 2018, tercatat ada 40 iklan owa, dan pada Desember 2018, tercatat ada 46 iklan. Demikian pula, studi yang dilakukan pada tahun 2014-2015 menemukan adanya iklan di media sosial terhadap lebih dari 300 individu satwa liar dari sekitar 80 spesies yang berbeda, termasuk owa dan satwa liar yang dilindungi lainnya (Krishnasamy dan Stoner, 2016).

Media sosial semakin melancarkan perdagangan kera melalui praktik populer, yaitu mengirim "swafoto" yang diambil bersama satwa liar, misalnya owa muda. Foto wisatawan bersama kera yang ada dalam kurungan dapat memprovokasi undang-undang perlindungan satwa, meningkatkan permintaan akan penangkapan satwa ini dari hutan, dan menimbulkan anggapan swafoto dan foto bersama satwaliar ini adalah perilaku yang normal (Malone *et al.*, 2003).

Rekomendasi Kebijakan

Mengembangkan Kerangka Hukum Efektif

Kerangka Hukum Dalam Negeri

Semua kera dilindungi hukum di negara habitat kera, tetapi firma intelijen hukum, Legal Atlas, menemukan bahwa ada banyak celah yang perlu dilengkapi untuk menjamin pelaksanaan perlindungan penuh bagi kera. Dari pemeriksaan yang dilakukan perusahaan terhadap kerangka hukum di 17 negara wilayah jelajah kera, Legal Atlas mengidentifikasi adanya kelemahan terkait pengolahan, pengangkutan, dan penyimpanan satwa liar, serta iklan, pameran, kepemilikan, dan perawatan untuk kesejahteraannya (Legal Atlas, tanpa tahun). Kerangka hukum yang lemah dan tidak efektif memungkinkan para pedagang, terutama mereka yang berada di tingkat menengah dan tinggi dalam rantai perdagangan, menjalankan bisnis ilegal mereka yang menguntungkan dengan risiko rendah untuk dapat didekati, ditangkap, dituntut, atau dihukum (Clough dan May, 2018).

Legal Atlas menyatakan bahwa peluang penegakan hukum akan meningkat jika semua kera, termasuk spesies asli dan bukan asli, dimasukkan dalam daftar dilindungi di undang-undang perlindungan satwa liar di semua negara. Spesies-spesies tersebut harus dicantumkan sebagai satwa yang dilindungi di negara-negara yang bukan habitat mereka sehingga ada lebih banyak hal yang dapat dilakukan untuk menghentikan diperdagangkannya satwa tersebut lintas negara. Di sebagian besar wilayah yurisdiksi, spesies yang telah dicantumkan berhubungan dengan beberapa undang-undang yang mengatur tentang bagian-bagian rantai perdagangan dan memberlakukan pembatasan, seperti larangan atau persyaratan untuk memberikan lisensi atau izin (Legal Atlas, tanpa tahun). Selain memasukkan semua kera sebagai spesies yang dilindungi, pembuat kebijakan harus secara jelas mengkriminalisasi semua perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, kepemilikan, dan pemanfaatan kera liar atau produk kera. Kerangka hukum harus mengatur tentang perburuan, pengangkutan, penyimpanan, pameran, eksperimen, periklanan, dan kesejahteraan (Legal Atlas, tanpa tahun).

Untuk melawan perdagangan kera dan spesies lain, rangkaian kebijakan, perangkat hukum, dan penegakan hukum yang terpadu dan

menyeluruh diperlukan untuk menangani semua pelaku yang terlibat. Karena perdagangan ilegal kera memiliki cakupan global dan terdiri dari serangkaian tindak pidana yang kompleks, semua negara harus melakukan peninjauan terhadap kerangka hukum dan kerangka peraturan nasionalnya sebagai langkah pertama menuju perbaikan. Mengingat hubungan antara perdagangan satwa liar dan kegiatan kriminal lainnya yang lihai, maka perdagangan ini harus dianggap sebagai masalah tata kelola inti, bukan diperlakukan hanya sebagai suatu masalah konservasi (Robertson, 2017).

Berbagai tindakan diperlukan untuk menyusun kerangka hukum yang efektif, dan pelaksanaannya bergantung pada kerja sama antarotoritas terkait (Roe dan Booker, 2019). Untuk memulai hal ini, pembuat kebijakan harus menerapkan undang-undang yang tegas yang dapat membuat pelanggar bertanggung jawab atas tindak pidananya terlepas dari apakah tindakan itu dilakukan di bagian bawah atau atas rantai perdagangan. Selanjutnya, diperlukan penguatan terhadap penegakan hukum yang ditargetkan dan sistem peradilan pidana untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan terhadap satwa liar secara efektif. Selain itu, hukuman bagi terpidana harus cukup kuat untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain. Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC) menawarkan panduan terperinci bagi pembuat kebijakan tentang penyusunan peraturan perundangan yang melindungi satwa liar dengan mengkriminalisasi kejahatan serius dan memungkinkan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan tersebut melalui sistem peradilan (UNODC, 2018).

Sanksi Hukum

Untuk mencegah niat jahat dan membatasi kesempatan yang ada, entitas penegak hukum harus meningkatkan upaya yang dibutuhkan untuk mengatasi kejahatan terhadap satwa liar dan meningkatkan kemungkinan ditangkapnya pelaku kejahatan (Clarke, 2009). Pada saat yang sama, imbalan yang diperoleh dari kejahatan tersebut harus dikurangi dan berbagai risikonya ditingkatkan. Untuk mencapainya, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan berbagai konsekuensi, termasuk penyitaan aset, hukuman penjara, dan denda.

Untuk menentukan denda yang tepat bagi suatu kejahatan, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-Operation and Development/ OECD) menyediakan tiga pedoman umum. Pertama, denda harus lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari tindakan kejahatan. Kedua, denda harus menghilangkan keuntungan finansial dengan cara menyesuaikan besarnya denda dengan sesuatu yang diperdagangkan secara ilegal. Ketiga, denda harus sebanding dengan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan (OECD, 2009).

Walaupun tidak ada kesepakatan global terkait berapa lama hukuman penjara yang diberikan bagi kejahatan terhadap satwa liar, Konvensi PBB Anti Kejahatan Terorganisir Lintas Negara (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime/ UNTOC) merekomendasikan agar para pembuat kebijakan menjadikan perdagangan ilegal terhadap spesies genting sebagai kejahatan serius (UNGA, 2020). Demikian pula, pada tahun 2015, Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA) menerbitkan resolusi yang menyerukan agar negara-negara anggota menganggap kejahatan ini sebagai kejahatan serius (UNGA, 2015). Berdasarkan pedoman UNTOC, pelaku kejahatan serius harus dikenakan hukuman penjara minimum empat tahun. Meskipun sebagian besar negara anggota PBB tidak memberlakukan hukuman penjara empat tahun untuk kejahatan terhadap satwa liar sebelum resolusi tahun 2015, negara-negara ini didesak untuk memberlakukannya sebagai upaya yang penting dalam mencegah aksi para pedagang ilegal (UNODC, 2016).

Korupsi memiliki relevansi tertentu terhadap kera besar dan mengurangi efektivitas kerangka hukum (CITES, 2019). Perusahaan kriminal terorganisasi diketahui mengeksploitasi para pejabat dari sektor perusahaan dan pemerintah (Legal Atlas, tanpa tahun). Sebagai contoh, laporan dari The New York Times mendokumentasikan para pejabat pemerintah yang memalsukan izin perdagangan satwa liar (Gettleman, 2017). Legal Atlas merekomendasikan agar memberlakukan pidana yang lebih berat terhadap kejahatan yang melibatkan adanya unsur pemberat, pejabat korup, perdagangan ilegal bernilai tinggi, pelaku kejahatan berulang, atau jaringan transnasional. Selain itu, sanksi terhadap kejahatan harus mencakup pemecatan pejabat dari jabatannya (Legal Atlas, tanpa tahun). Pedoman UNODC tersedia bagi pembuat kebijakan yang berupaya membasmi korupsi dari otoritas pengelola satwa liar (UNODC, 2019).

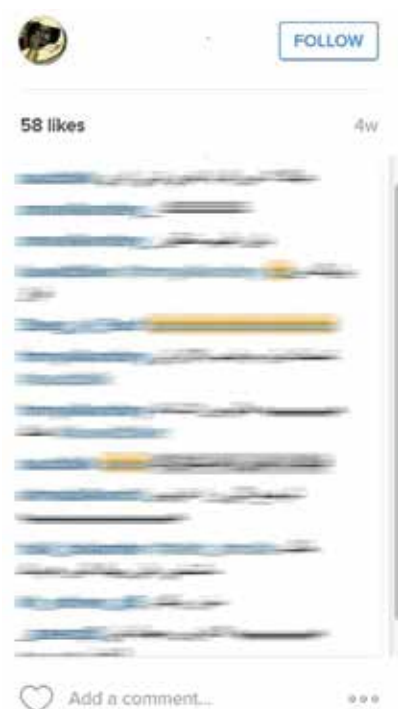
Kerangka Kebijakan Internasional

Perdagangan satwa liar dalam negeri diatur dalam undang-undang, misalnya undang-undang pengelolaan satwa liar dan undang-undang kehutanan, sedangkan perdagangan internasional diatur dalam Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam Punah (CITES) PBB. Semua spesies kera tercantum dalam Lampiran I CITES, yang menunjukkan bahwa perdagangan internasional terhadap kera adalah kegiatan yang ilegal. Organisasi antarpemerintah yang mengatur perdagangan kera di luar negara asalnya mencakup UNODC, Organisasi Kepabeanan Dunia (World Customs Organization/WCO), Komisi Polisi Kriminalitas Internasional (INTERPOL), dan Kemitraan Kelangsungan Hidup Kera Besar (Great Apes Survival Partnership/GRASP). Sayangnya, efektivitas organisasi-organisasi tersebut dalam menghentikan perdagangan ilegal kera terhambat oleh kurangnya sumber daya. Sebagian besar organisasi tersebut bergantung pada pendanaan eksternal dan bukan anggaran inti untuk melaksanakan kegiatan pencegahan kejahatan terhadap satwa liar. Pemerintah, LSM, dan yayasan yang ada harus membantu mengatasi masalah ini dengan memberikan dukungan

keuangan kepada organisasi-organisasi tersebut dan menawarkan keahlian teknis dalam inisiatif kolaboratif.

Pada pertemuan ke-18 Konferensi Para Pihak terkait perjanjian CITES, negara-negara anggota menyampaikan resolusi tentang konservasi dan perdagangan kera besar dengan menyebutkan nilai penting budaya, ekologis, dan ilmiah yang secara khusus dimiliki spesies kera sebagai kerabat terdekat manusia di alam liar serta dengan menjelaskan status perlindungannya. Resolusi ini menunjukkan kekhawatiran terhadap populasi semua kera besar di alam liar yang terancam oleh dampak perburuan liar sekaligus kegiatan lainnya yang dilakukan oleh manusia, yang menyebabkan penurunan populasi yang drastis. Untuk membantu membalikkan tren ini, negara-negara anggota didesak untuk memberlakukan undang-undang yang melarang semua perdagangan komersial internasional terhadap kera besar, termasuk pemilikan, pertunjukan, pembelian, atau penjualan satwa yang ditangkap di alam liar (CITES, 2019). Selain itu, resolusi ini mendesak agar negara-negara anggota memperkuat upaya penegakan hukum, misalnya upaya antiperburuan liar dan antipenyelundupan, dan menerapkan hukuman demi mencegah terjadinya perdagangan ilegal. Jika kera besar, daging, atau bagian tubuhnya disita, negara-negara anggota harus menggunakan ilmu forensik untuk menentukan negara habitat asal dan berkontribusi terhadap basis data yang dikelola oleh CITES, GRASP, dan IUCN.

Resolusi ini juga mengakui perlunya dukungan internasional bagi negara-negara sebaran kera besar sekaligus seruan bagi masyarakat internasional untuk segera membantu menindaklanjuti. Pemerintah, organisasi antarpemerintah, lembaga bantuan internasional, LSM, dan donor secara khusus diminta untuk membantu melakukan penegakan, pelatihan, peningkatan kapasitas, dan inisiatif pendidikan, mengembangkan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat kera, melakukan pemantauan terhadap populasi kera besar, memitigasi konflik antara manusia dan satwa liar, menawarkan keahlian ilmiah, teknis, dan hukum, menyediakan pendanaan, dan memulihkan serta mengelola habitat (CITES, 2019). Meskipun rekomendasi ini ditujukan untuk kera besar, hal ini tetap dapat diterapkan untuk semua spesies kera.



Jika kera besar atau owa diambil secara ilegal dari alam liar, maka semua tindakan yang menyertainya juga harus secara nyata dilarang oleh undang-undang, mulai dari pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, pertunjukan, eksperimen, pengiklanan, perdagangan dalam dan luar negeri, pemanfaatan, hingga pemilikan. Tangkapan layar yang diberikan oleh PEGAS.

KOTAK 2

Panduan Analisis Kejahatan terhadap Satwa Liar dan Hutan

Konsorsium Internasional untuk Memerangi Kejahatan terhadap Satwa Liar (International Consortium for Combating Wildlife Crime/ ICCWC) merupakan inisiatif gabungan dari lima organisasi antarperintah yang mendukung sistem peradilan pidana untuk meningkatkan upaya pencegahan kejahatan terhadap satwa liar dan hutan. ICCWC bermitra dengan CITES, INTERPOL, UNODC, World Bank Group, dan WCO. Berbagai organisasi mitra ini menawarkan lembaga pemerintah sekitar 30 kursus pengembangan kapasitas yang berbeda-beda dan lima jasa dukungan operasional serta sejumlah sumber daya, alat, dan program pelatihan (ICCWC, 2018).

Panduan Analisis Kejahatan terhadap Satwa Liar dan Hutan yang disusun oleh ICCWC menyajikan pedoman pelaksanaan yang mencakup undang-undang, penegakan hukum, kehakiman dan penuntutan, faktor-faktor pendorong dan pencegahan, serta data dan analisis bagi pembuat kebijakan (UNODC, 2012). Unsur-unsur ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Diperlukan pendekatan terkoordinasi dan multisektor, termasuk partisipasi semua pemangku kepentingan terkait, untuk secara efektif memberikan respons nasional pada kejahatan terhadap satwa liar dan hutan. Panduan ini menyajikan kerangka kerja untuk menyusun strategi pencegahan dan strategi respons dan mencakup sejumlah sumber daya yang dapat digunakan dalam berbagai kombinasi untuk memenuhi kebutuhan khusus suatu negara. Panduan ini menyajikan beberapa persoalan utama yang akan dikaji, termasuk penyebab utama kejahatan, upaya pencegahan secara administratif, dan respons sistem peradilan pidana.

Dengan menggunakan panduan ini, pembuat kebijakan dapat melakukan analisis yang menyeluruh terhadap pengelolaan satwa liar, penegakan hukum, serta kapabilitas dan sistem peradilan dan penuntutan nasional. Panduan ini juga meningkatkan pemahaman tentang pelaku dalam rantai perdagangan dan kejahatan terhadap satwa liar serta faktor-faktor pendorong di baliknya. Pembuat kebijakan kemudian dapat menggunakan panduan ini untuk merancang intervensi atau mengidentifikasi celah dan area yang memerlukan pelatihan atau bantuan teknis untuk mendeteksi atau mencegah kejahatan.

Kesejahteraan Kera dalam Kurungan

Kepemilikan kera liar sebagai peliharaan, penggunaannya untuk hiburan, dan penampilannya di kebun binatang dan taman safari yang tidak dikelola dengan baik dapat membahayakan kesejahteraan kera. Peraturan yang lebih kuat untuk kesejahteraan kera dan penegakan peraturan ini dapat membantu melindungi spesies rentan ini dari pengabaian atau penganiayaan fisik dan psikologi. Selain itu, asosiasi kebun binatang dunia dengan keahlian merawat kera harus bermitra dengan badan regulasi untuk menyediakan sumber daya guna mendukung kesejahteraan kera di berbagai suaka dan menyediakan pedoman tentang beberapa topik, misalnya upaya mencegah hibridisasi dan mengurangi angka kematian janin dan bayi. Upaya menjamin kesejahteraan kera dalam kurungan, yang merupakan makhluk yang sangat cerdas & berhubungan dekat dengan manusia, adalah suatu kewajiban etis.

Sebagaimana dibahas sebelumnya, suaka untuk kera yang diselamatkan maupun yang disita membutuhkan ruang yang lebih luas dan dukungan keuangan tambahan untuk dapat menerima dan merawat satwa yang saat ini dalam kondisi buruk. Pemerintah, LSM, dan yayasan harus berupaya mengalokasikan pendanaan yang lebih besar agar suaka dapat melakukan ekspansi hingga mekanisme yang efektif dapat diterapkan untuk menghentikan perdagangan ilegal kera, yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dari pembuat kebijakan.

Melalui resolusi CITES tahun 2019 terkait kera besar, 182 negara dan Uni Eropa menegaskan kembali bahwa tidak ada kondisi

si yang membenarkan pengambilan kera di alam liar (CITES, 2019). Semua negara anggota diperingatkan untuk waspada terhadap kera besar dari alam liar yang diperdagangkan, yang dianggap merupakan kera hasil penangkaran. Resolusi ini juga memahami perlunya bantuan dan dukungan teknis bagi negara anggota agar dapat menyita dan merawat kera besar hidup. Selanjutnya, negara anggota didesak untuk mengembalikan kera besar yang disita ke negara asalnya jika ada pusat-pusat penyelamatan yang mampu menjamin kesejahteraan kera.

Menegakkan Kerangka Hukum

Sebagaimana disebutkan di atas, penyusunan kerangka hukum hanyalah langkah pertama dalam mengatasi pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan kera. Tanpa penegakan undang-undang yang efektif dan terarah, perdagangan ilegal satwa liar dapat tetap menjadi usaha yang menguntungkan dan berisiko rendah, terutama bagi pihak-pihak dengan kedudukan yang lebih tinggi dalam rantai perdagangan (Holmern, Muya, dan Roskaff, 2007). Pembuat kebijakan harus memastikan agar lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai kelemahan yang saling berkaitan, yang menyebabkan perdagangan ilegal kera terus terjadi. Kelemahan ini mencakup kurangnya penyediaan sumber daya bagi penyidik, rendahnya jumlah penuntutan, rendahnya keberhasilan penuntutan, korupsi sektor swasta dan publik, dan keterlibatan media sosial dan perusahaan jasa keuangan.

Pembuat kebijakan harus memastikan agar penegakan kerangka hukum dilaksanakan dengan konsisten di setiap titik dalam rantai perdagangan satwa liar, yang mencakup lokasi sumber, tempat transit, dan pasar tujuan. Hingga saat ini, pemerintah di berbagai negara habitat kera hanya menekankan penegakan hukum di lokasi sumber, dengan menargetkan pemburu yang berada di bagian bawah rantai perdagangan. Pemberlakuan undang-undang dan peraturan internasional harus meliputi penyidikan, penangkapan, penuntutan, pemidanaan, dan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan di tingkat mana pun. Langkah-langkah ini berfungsi untuk menyingkirkan pemain utama dari jaringan kejahatan dan memberikan peringatan yang kuat untuk mencegah pihak lain yang mungkin hendak menggantikan posisinya. Selain itu, intervensi lebih lanjut yang dilakukan di sepanjang rantai perdagangan dengan menargetkan pedagang ilegal tingkat tinggi dan gembong yang bertanggung jawab untuk merekrut, mempersiapkan, dan mendanai kegiatan ilegal ini, serta mengeksport kera dan produk kera, dapat membantu mencegah adanya perekrutan pelaku pada tingkat yang lebih rendah yang terlibat dalam perburuan liar, penyimpanan, dan pengangkutan (Moneron, Armstrong, dan Newton, 2020).

Keberhasilan penegakan hukum dapat dicapai dengan adanya kerja sama yang erat antarlembaga, misalnya polisi hutan, polisi, dan pabean. Mengingat sifat perdagangan ini yang beragam dan global, maka kerja sama antarlembaga (baik nasional maupun internasional) sangat diperlukan. Studi yang dilakukan Legal Atlas terhadap 17 negara wilayah jelajah kera menemukan bahwa umumnya enam lembaga penegak hukum dan lima otoritas pengelolaan yang berbeda memiliki tanggung jawab yang tumpang-tindih atas perdagangan ilegal satwa liar (Legal Atlas, tanpa tahun). Untuk dapat secara efektif mengkoordinasikan penegakan hukum terkait satwa liar, Legal Atlas merekomendasikan agar masing-masing negara wilayah jelajah kera membentuk satuan tugas kejahatan terhadap satwa liar. Satuan tugas ini harus diberi mandat untuk memimpin inisiatif pencegahan kejahatan, pengumpulan informasi intelijen, penyidikan tindak pidana, dan penuntutan (Legal Atlas, tanpa tahun).

Penegakan hukum juga harus dilakukan di pasar konsumen yang bertanggung jawab atas timbulnya permintaan akan kera dan produk kera. Untuk menghentikan aliran perdagangan lintas negara, pengendalian impor dan ekspor harus diperkuat. Penguatan ini mencakup peningkatan deteksi di pusat transit, misalnya bandara, yang dapat dilakukan dengan efektif melalui penggunaan anjing pelacak terlatih. Petugas kepabeanan juga harus dididik tentang perdagangan ilegal ini dan diajari cara membedakan antara produk ilegal satwa liar dan produk legal (Chaber *et al.*, 2010). INTERPOL dan Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO) menekankan perlunya komitmen politik agar polisi dan lembaga kepabeanan meresmikan hubungan kerja yang kooperatif dan efisien (INTERPOL dan WCO, 2018).

Menurut ICCWC, efektivitas respons penegakan hukum dapat dievaluasi berdasarkan delapan hasil yang diharapkan, yaitu dasar hukum, pencegahan, deteksi, penyidikan intelijen, teknik khusus, penuntutan, hukuman, dan pendekatan holistik. ICCWC menawarkan alat penilaian diri (*self-assessment*) dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol dengan 50 indikator yang lengkap sebanyak yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memantau perubahan dalam kapasitas dan efektivitas penegakan hukum nasional dari waktu ke waktu (ICCWC, 2016).

Pada akhirnya, agar berjalan efektif, penegakan hukum harus dapat mencegah kera agar tidak dibunuh atau ditangkap di alam liar (Felbab-Brown, 2018). Ada bukti yang menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan di sumbernya paling efektif jika dilaksanakan secara kooperatif bersama dengan penduduk setempat dan polisi (Hawdon dan Ryan, 2011). Strategi untuk melibatkan masyarakat dalam konservasi dan pencegahan kejahatan terhadap satwa liar dibahas dengan terperinci di bawah ini.

Mengatur Industri

Berbagai proyek industri di wilayah terpencil yang merambah habitat kera merupakan fasilitator dan faktor pendorong signifikan terhadap pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan ilegal kera dan spesies genting lainnya. Pelaku industri bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak langsung dan tidak langsung dari pemukiman manusia yang berkaitan dengan proyeknya. Selain itu, mereka perlu menetapkan pengendalian dan tindakan untuk mencegah dan memitigasi berbagai kegiatan ilegal tersebut. Melalui sebuah resolusi, negara-negara anggota perjanjian CITES mendesak agar para pelaku di industri pertanian, energi, dan ekstraktif mematuhi kerangka hukum nasional dan internasional dan meminimalkan dampak terhadap populasi dan habitat kera besar melalui pelaksanaan praktik terbaik (CITES, 2019).

Pembuat kebijakan yang mengatur kegiatan industri harus menentang proyek yang berisiko tinggi menimbulkan dampak terhadap habitat kera dan harus memberlakukan pengamanan yang ketat pada proyek yang diizinkan untuk melanjutkan operasinya. Perusahaan yang terlibat dengan pertanian industri, eksplorasi minyak dan gas, serta pembangunan infrastruktur linier ataupun tetap diwajibkan (berdasarkan sejumlah ketentuan dalam izin dari pemerintah) untuk memberikan layanan dasar bagi para pekerja dan masyarakat sekunder agar menghilangkan tekanan terhadap lingkungan alami dan satwa liar. Masyarakat pekerja harus diberikan akses terhadap pendidikan, listrik, pekerjaan, ketahanan pangan, perawatan kesehatan, sanitasi, telekomunikasi, transportasi, dan air. Pelaksana proyek juga harus berupaya untuk mencegah pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan ilegal kera dan spesies dilindungi lainnya, termasuk mengurangi ancaman konflik antara manusia dan satwa liar.



Laporan tahun 2018 untuk CITES mengidentifikasi beberapa ancaman utama terhadap kelangsungan hidup kera besar, yaitu kehilangan, degradasi, dan fragmentasi habitat, penyakit menular, perburuan liar untuk memperoleh daging secara ilegal dan sembarangan, dan pembunuhan disengaja akibat konflik atas lahan. Bangkai simpanse yang disita, setelah dilakukannya penangkapan terhadap para pedagang, Douala, Kamerun. © LAGA dan The EAGLE Network



Orang utan jantan berbantalan pipi di habitat alaminya. © Paul Hilton/Earth Tree Images



Orang utan jantan berbantal pipi dalam kurungan. © Paul Hilton/Earth Tree Images

Semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekspansi industri harus berupaya mencapai pembangunan ekonomi yang berdampak bersih positif terhadap keanekaragaman hayati atau yang tidak menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Pembuat peraturan seharusnya hanya menyetujui pembangunan yang berprioritas menghindari atau mencegah dampak yang merugikan terhadap keanekaragaman hayati, jika memungkinkan. Upaya pencegahan paling efektif jika dilakukan di awal proses, misalnya oleh pembuat kebijakan pada tahap perencanaan strategis nasional, atau oleh pihak pelaksana selama proses penilaian lingkungan strategis tingkat lanskap. Peraturan yang dibuat harus mewajibkan agar dampak yang tak terhindarkan diminimalkan dan dikurangi saat melakukan pembangunan, kemudian sesegera mungkin direhabilitasi, diperbaiki, atau dipulihkan. Lih. Volume 3, *Negara Kera: Pembangunan Infrastruktur dan Konservasi Kera* untuk informasi lebih lanjut tentang mitigasi dampak proyek.

Pasar Online Tertutup

Sebagian besar negara tidak memiliki kerangka hukum yang digunakan untuk mengatasi tantangan yurisdiksi yang ditimbulkan oleh perdagangan online satwa liar (Wingard dan Pascual, 2018). Sistem peraturan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi dalam hal pengiklanan dan penjualan online harus diamendemen dengan ketentuan perundangan yang baru. Akan tetapi meski kerangka hukum diberlakukan, penegakan hukum masih sulit diterapkan saat melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pedagang ilegal online. Sulit untuk mengidentifikasi tersangka yang terlibat dalam perdagangan online atau menentukan asal-usul spesies yang diperdagangkan. INTERPOL menyediakan pedoman bagi lembaga penegak hukum yang berupaya mengatasi kejahatan online terhadap satwa liar (INTERPOL, 2020).

Dalam hal ini, kerja sama antara perusahaan internet dan media sosial diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum yang efektif. Pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum harus secara aktif melibatkan perusahaan demi mendorong dilakukannya kerja sama dan menjamin dipahaminya undang-undang yang berlaku terkait satwa liar. Perusahaan harus berupaya memperoleh panduan dari para regulator terkait penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan yang kuat guna mencegah adanya kegiatan ilegal dalam platformnya. Dalam rangka penegakan hukum, perusahaan juga harus memberikan dukungan penuh bagi penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang terkait satwa liar.

Ada beberapa perusahaan media sosial yang bekerja sama dengan inisiatif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan tujuan untuk mengatasi perdagangan ilegal yang dilakukan melalui platformnya. Sebagai contoh, Koalisi untuk Menghentikan Perdagangan Ilegal Online Satwa Liar (Coalition to End Wildlife Trafficking Online) diluncurkan oleh World Wildlife Fund (WWF), Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce (TRAFFIC), dan International Fund for Animal Welfare (IFAW) pada tahun 2018 untuk melibatkan industri teknologi (WWF, 2018; tanpa tahun). Sebanyak 36 anggota dari koalisi ini, yang terdiri dari berbagai perusahaan global, pada bulan Maret 2020 telah memblokir atau menghapus lebih dari 3,3 juta daftar yang melanggar kebijakan terkait satwa liar (The Coalition, 2020). Untuk membantu koalisi ini, LSM telah memilah daftar berisi sekitar 250 tagar (#) media sosial yang diyakini berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa liar atau kegiatan terkait lainnya, termasuk 'swafoto' bersama satwa liar.

Selain itu, Instagram anggota koalisi, yang dimiliki oleh Facebook, telah menerapkan sistem peringatan aktif yang akan muncul saat pengguna mencari konten yang mungkin berhubungan dengan perdagangan ilegal satwa liar. Pengguna akan menerima peringatan dalam bentuk *pop-up* otomatis yang menunjukkan tautan menuju informasi tentang perdagangan ilegal satwa hidup dan produk satwa liar. Akan tetapi *pop-up* ini bersifat opsional dan tidak mencegah pengguna untuk melanjutkan ke halaman yang dikehendakinya (Instagram, 2017). Para pembuat kebijakan dan berbagai platform media sosial harus memahami kemampuan media sosial untuk menginformasikan pembuatan kampanye tambahan dan mencari cara proaktif untuk mengurangi permintaan dan mencegah perdagangan ilegal terhadap satwa liar.

Melibatkan Masyarakat dan Menjamin agar Masyarakat Menerima Manfaat

Penegakan hukum, jika digunakan secara terpisah, sering kali menjadi pendekatan yang tidak memadai dalam upaya pencegahan kejahatan terhadap satwa liar. Penuntutan yang tidak sebanding, yang hanya menargetkan pelaku kejahatan tingkat rendah daripada gembong yang berkuasa, dapat mengubah opini publik terhadap satwa liar, organisasi konservasi, dan lembaga penegakan hukum. Sebagian besar negara memprioritaskan penegakan hukum di dalam dan di sekitar habitat kera sebagai metode yang dipilih untuk mengatasi pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan kera, daripada menyeimbangkan penegakan hukum dengan partisipasi masyarakat dan pendekatan perubahan perilaku sebagaimana semestinya.

Jika perburuan dikaitkan dengan konflik yang terjadi antara manusia dan kera akibat perusakan tanaman, maka penting bagi pemangku kepentingan untuk memahami persoalan masyarakat terkait keselamatan pribadi serta ketahanan pangan dan ekonomi. Setelah konteks ini dipahami, strategi mitigasi yang tepat dapat diidentifikasi. Pedoman terkait persoalan ini yang dibuat oleh IUCN dan organisasi mitra menunjukkan berbagai intervensi yang dapat dilakukan, termasuk penetapan zona penyangga antara habitat kera dan permukiman manusia, pembangunan batas fisik untuk memisahkan tanaman dan hewan ternak dari satwa liar, substitusi tanaman, dan skema kompensasi untuk mengganti kerusakan tanaman (Bowen-Jones, 2012; Hockings dan Humle, 2009).

Pengetahuan masyarakat tentang lingkungan dan kedekatan penduduk setempat dengan habitat kera menjadikan masyarakat kandidat yang ideal untuk dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan satwa liar (Felbab-Brown, 2017). Kesepakatan dan partisipasi masyarakat dalam inisiatif antiperburuan liar dan antiperdagangan ilegal harus diprioritaskan karena dapat membantu mengurangi adanya keterlibatan dalam kejahatan oportunistik yang dapat menjerumuskan anggota masyarakat. Pembuat kebijakan harus memberdayakan penduduk setempat dengan memberikan kendali dan wewenang yang lebih besar kepada penduduk atas keputusan pengelolaan sumber daya alam (Blomley *et al.*, 2010; Vermeulen *et al.*, 2009). Alih bagi kekuasaan, tata kelola, dan struktur insentif harus dikembangkan melalui konsultasi bersama masyarakat sehingga mereka dapat mengelola biaya dan manfaat konservasi.

Kelompok masyarakat sipil setempat yang terdapat dalam masyarakat harus dilibatkan untuk menjalankan peran fasilitasi antara penduduk, lembaga pemerintah, dan LSM internasional. Metode *bottom-up* (dari bawah ke atas) yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya cenderung lebih berhasil dibanding mandat *top-down* (dari atas ke bawah) yang dibebankan kepada masyarakat oleh pemangku kepentingan eksternal.

Insentif untuk Konservasi

Masyarakat yang tinggal di dekat habitat kera cenderung lebih mendukung konservasi jika mereka diberdayakan untuk melindungi manfaat yang dapat terukur maupun yang tidak dapat terukur dari alam. Penduduk yang ada dalam setiap masyarakat dipengaruhi oleh faktor keuangan maupun nonkeuangan, termasuk di antaranya kepercayaan, faktor kognitif, budaya, gaya hidup, norma, dan nilai yang dianut (Milner-Gulland dan Rowcliffe, 2007; Vining dan Ebreo, 2002). Pada akhirnya, keputusan untuk berburu atau melestarikan satwa liar dibuat berdasarkan signifikansi relatif dari individu terhadap berbagai unsur, yang dapat menentukan opsi untuk menghasilkan keuntungan bersih yang lebih besar (Cooney *et al.*, 2017).

Penelitian menunjukkan bahwa jika masyarakat memperoleh manfaat dari satwa liar, maka mereka akan terdorong untuk terus terlibat dalam konservasi guna mempertahankan akses terhadap manfaat tersebut (Cooney *et al.*, 2018). Sebaliknya, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat menghambat keterlibatan masyarakat dan dapat menimbulkan tindak balas terhadap satwa liar atau otoritas konservasi (Twinamatsiko *et al.*, 2014). Kebijakan pengelolaan satwa liar harus bertujuan untuk mengurangi biaya dimaksud, yang dapat mencakup konflik antara kera dan manusia, kerusakan tanaman, ternak, atau properti, penularan penyakit kepada manusia atau ternak, atau terbatasnya atau berkurangnya akses terhadap lahan atau sumber daya alam.



Tinjauan terbaru pada kejahatan terhadap satwa liar menunjukkan bahwa masyarakat didorong oleh empat tujuan utama yang biasanya saling terkait: memenuhi kebutuhan subsisten dasar; mendapatkan penghasilan; melakukan tindak balas terhadap ketidakadilan konservasi yang dirasakan; dan melengkapi praktik budaya tradisional. Orang utan mati yang ditemukan dengan 62 peluru di dalam tubuhnya. © Paul Hilton/Earth Tree Images

Pembuat kebijakan harus menyusun struktur tata kelola dan insentif yang mendorong penduduk setempat untuk melindungi satwa liar dan bukan memburunya. Agar berjalan efektif, berbagai kebijakan harus disusun dengan tujuan meningkatkan manfaat dan mengurangi biaya perlindungan satwa liar sekaligus mengurangi keuntungan dan meningkatkan biaya kegiatan ilegal (Challender dan MacMillan, 2014). Pemerintah harus dengan kritis melindungi kekuasaan lahan dan hak kepemilikan sumber daya alam masyarakat. Penduduk harus memiliki kapasitas guna memanfaatkan alam untuk kegiatan berkelanjutan, misalnya pengumpulan hasil hutan bukan kayu untuk digunakan atau dijual dan penangkapan ikan secara subsisten. Jika perburuan untuk memperoleh daging satwa liar mengancam kera, alternatif protein yang terjangkau harus disediakan. Guna mendorong perlindungan kera lebih lanjut, dukungan keuangan dapat ditawarkan, misalnya melalui pengadaan kredit mikro atau pembayaran untuk skema jasa ekosistem (WCS Nigeria, tanpa tahun; Wicander dan Coad, 2018).

Investasi juga harus dilakukan untuk mengembangkan lapangan kerja atau peluang memperoleh penghasilan secara berkelanjutan bagi penduduk, misalnya melalui pariwisata satwa liar berbasis masyarakat, pengelolaan kawasan lindung, atau pendampingan penelitian ilmiah (Drewry, 1997; Macfie dan Williamson, 2010; Russell, 2001). Pada beberapa kasus, pariwisata berbasis kera dapat menghasilkan manfaat signifikan, yang menjadi insentif konservasi bagi masyarakat setempat. Namun pandemi COVID-19 global telah menimbulkan risiko tersendiri jika bergantung pada pariwisata satwa liar sebagai strategi utama konservasi.

Mendukung Perubahan Perilaku

Intervensi Kebijakan

Selama masih ada permintaan akan kera atau produk kera dan industri ilegal masih menguntungkan para pelaku kejahatan, maka pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan kera kemungkinan akan terus terjadi. Dengan demikian, intervensi yang sasarannya pemanfaatan akhir kera, daging, dan bagian tubuhnya harus dilaksanakan seiring dengan kegiatan penegakan hukum di sepanjang rantai perdagangan.

Pembuat kebijakan harus memfasilitasi kerja sama antara masyarakat, pemerintah, industri, LSM, dan media untuk mengatasi berbagai faktor pendorong hilangnya keanekaragaman hayati. Kebijakan yang ada harus dapat melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan sektor swasta dalam penyusunan strategi yang menghambat dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan perusakan ekosistem.

Karena sikap terhadap kera dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya dan ekonomi, maka pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks budaya yang mendorong pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan ilegal kera serta konsumsi atau pemanfaatan produk kera, menjadi langkah penting dalam mengembangkan upaya intervensi yang efektif untuk menghentikan kegiatan ilegal ini. Pembuat kebijakan harus melibatkan para mitra dalam membantu menetapkan dan menilai faktor-faktor budaya tertentu yang ada dalam suatu masyarakat dengan menggunakan pendekatan partisipatif, lalu merancang strategi untuk mengurangi permintaan dan mengubah perilaku berdasarkan keadaan tersebut (Wilkie *et al.*, 2016).

Jika daging kera dikonsumsi atau bagian tubuhnya dimanfaatkan, survei rona awal dapat membantu mengungkap motivasi dan menginformasikan intervensi yang dapat dilakukan untuk

mengurangi permintaan dengan tetap menghormati identitas budaya masyarakat (van Vliet dan Mbazza, 2011). Pendidikan konservasi di sekolah dan pemanfaatan platform media massa dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan pesan untuk melakukan perubahan perilaku. Sebagai contoh, kampanye penyadartahuan publik yang bertujuan mengurangi konsumsi daging gorila di Nigeria menggunakan drama serial radio untuk memengaruhi sikap terhadap satwa ini (WCS Nigeria, tanpa tahun; Wicander dan Coad, 2018).

Perubahan perilaku dapat membantu mengurangi permintaan yang ada, sehingga dapat menurunkan harga dan membuat perdagangan ini tidak menarik bagi pelaku kejahatan (Linkie *et al.*, 2015). Kampanye advokasi juga dapat membantu mengubah kebijakan pemerintah dan mendorong perubahan dalam aksi sektor swasta. Sebagai contoh, aktivis kesejahteraan satwa berpengaruh dalam pemanfaatan kera sebagai penghibur dalam industri hiburan.

Sebagai bagian dari pencegahan kejahatan situasional, masyarakat yang memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terlibat dalam perdagangan kera harus menjadi sasaran dalam penyadartahuan mengenai undang-undang, hukuman pidana, dan dampak sosial ekonomi terkait penangkapan, penuntutan, pemidanaan, dan akhirnya penjatuan denda atau hukuman penjara akibat kegiatan ilegal (Clarke, 2009).

Kampanye Perubahan Perilaku Publik

Kampanye perubahan perilaku yang mengintegrasikan argumen sikap, budaya, ekonomi, dan sosial harus digunakan untuk mengubah persepsi tentang konsumsi, pemeliharaan, atau pemanfaatan kera. Platform media sosial, yang telah dimanfaatkan untuk memperdagangkan satwa liar secara ilegal, juga menyediakan peluang untuk berkomunikasi dengan banyak orang dan menjangkau mereka dengan pesan yang mendukung konservasi. Inisiatif pemasaran digital dapat meningkatkan kesadartahuan dan memengaruhi sikap, perilaku, maupun opini yang ada. Kampanye online dan media massa dapat mencegah adanya konsumsi, memengaruhi pembuat kebijakan, memobilisasi tindakan sektor swasta, dan mengubah persepsi masyarakat. Pemerintah dan LSM harus memanfaatkan berbagai kegiatan yang ada dan menjalin kerja sama dengan para pemimpin opini yang berpengaruh dan entitas sektor swasta seperti internet dan perusahaan media.

Sebagai contoh, pada tahun 2016, Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) memulai kampanye berkelanjutan Wild for Life: Wildlife Crime Just Got Personal dalam sembilan bahasa, dengan

bermitra dengan 20 LSM. Tujuan kampanye ini adalah untuk memobilisasi dukungan publik, kemudian menyalurkannya untuk mendorong tindakan pemerintah. Tahap pertama Wild for Life menampilkan profil 26 spesies yang terdampak oleh kejahatan terhadap satwa liar, termasuk orang utan (Wild for Life, tanpa tahun). Tahap kedua dilakukan dengan menyertakan gorila dan simpanse. Kelompok yang terdiri dari 30 duta persahabatan dan selebritas yang merupakan para juara dengan total pengikut sebanyak 500 juta pengguna media sosial mendukung kampanye ini. Dengan demikian, berbagai pesan Wild for Life telah memperoleh 1,5 miliar penayangan di media sosial, 4,5 juta pelibatan sosial dengan konten, misalnya suka (*like*) dan bagikan (*share*), dan 50.000 janji dari para peserta untuk menggunakan lingkungan pengaruhnya sendiri untuk mencegah perdagangan ilegal satwa liar.

WildAid, LSM yang didedikasikan untuk mencapai pengurangan pada permintaan melalui kampanye penyadartahuan, menemukan bahwa perubahan perilaku terjadi saat khalayak memahami fakta utama yang tidak disadari sebelumnya atau saat norma sosial baru tercipta karena meningkatnya kesadartahuan. Survei terkait sikap yang dilaksanakan oleh WildAid untuk mengevaluasi dampak dari kampanye pengurangan permintaan oleh selebritas menunjukkan bahwa komunikasi dan iklan layanan masyarakat, misalnya iklan televisi, poster, baliho, dan konten media sosial, telah meningkatkan kesadartahuan, mengurangi kecenderungan untuk membeli produk ilegal satwa liar, dan mengurangi konsumsi satwa liar (WildAid, 2014, 2017, 2018a).

Sebagai contoh, 75% masyarakat yang disurvei oleh WildAid di Tiongkok pada tahun 2006 tidak menyadari bahwa sup sirip hiu terbuat dari hiu, karena makanan ini disebut sebagai 'sup sayap ikan' dalam bahasa Cina. Pada tahun 2013, setelah dilakukan kampanye selama bertahun-tahun, WildAid menemukan bahwa 85% responden yang disurvei di empat kota besar Tiongkok telah berhenti mengonsumsi sup sirip hiu. Dari semua responden yang disurvei, 65% di antaranya mengatakan bahwa kampanye penyadartahuan telah memengaruhi perilaku mereka (WildAid, 2014). Demikian pula, survei rona awal di yang dilakukan WildAid pada tahun 2014 di Vietnam menemukan bahwa 69% responden meyakini bahwa cula badak memiliki manfaat kesehatan. Saat survei lainnya terkait sikap dilakukan pada tahun 2016 untuk mengukur dampak kampanye penyadartahuan, persentase tersebut turun menjadi 9,4% (WildAid, 2018b). WildAid juga berhasil membagikan pengetahuan di Vietnam bahwa cula badak terbuat dari keratin, sama dengan rambut dan kuku manusia. WildAid mengukur adanya peningkatan pengetahuan sebesar 258% terkait fakta utama ini dalam periode dua tahun (WildAid, 2015).



© WildAid

Kesimpulan

Untuk menghentikan pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan ilegal kera dan produk kera yang membahayakan populasi satwa yang terus berkurang dan terfragmentasi di alam liar, maka penting bagi pemangku kepentingan untuk melaksanakan tindakan yang cepat, strategis, dan simultan di setiap titik intervensi di sepanjang rantai perdagangan. Perlindungan terhadap kera yang merupakan saudara terdekat manusia di alam liar memerlukan tindakan yang terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan pada tingkat lokal, nasional, dan global. Masyarakat, para donor, pemerintah, pihak perorangan, LSM, dan

pelaku sektor swasta memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dan berkolaborasi lintas wilayah geografis, sektor, dan disiplin ilmu untuk mengatasi berbagai faktor pendorong perburuan kera yang kompleks dan saling terkait. Semua pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk melindungi masa depan kera liar dan melibatkan diri sepenuhnya dalam perlindungan kera, mengingat status spesies ini yang rapuh. Dengan melindungi kera, maka habitat dan jasa ekosistemnya yang disediakan bagi manusia dan bagi kesehatan planet ini juga terlindungi. Pelaksanaan berbagai rekomendasi yang disajikan di sini membutuhkan peningkatan tata kelola dan investasi dalam pembangunan berkelanjutan yang harus diprioritaskan dalam agenda pembuat kebijakan di seluruh dunia.

Lampiran I. Kera Besar dan Owa

KERA BESAR		
Marga <i>Pan</i>		
Bonobo	<i>Pan paniscus</i>	■ Republik Demokratik Kongo (RDK)
Simpanse tengah	<i>Pan troglodytes troglodytes</i>	■ Angola ■ Kamerun ■ Republik Afrika Tengah ■ RDK ■ Guinea Khatulistiwa ■ Gabon ■ Republik Kongo
Simpanse timur	<i>Pan troglodytes schweinfurthii</i>	■ Burundi ■ Republik Afrika Tengah ■ RDK ■ Rwanda ■ Sudan Selatan ■ Tanzania ■ Uganda
Simpanse nigeria-kamerun	<i>Pan troglodytes ellioti</i>	■ Kamerun ■ Nigeria
Simpanse barat	<i>Pan troglodytes verus</i>	■ Ghana ■ Guinea ■ Guinea-Bissau ■ Pantai Gading ■ Liberia ■ Mali ■ Senegal ■ Sierra Leone
Marga <i>Gorilla</i>		
Gorila sungai cross	<i>Gorilla gorilla diehli</i>	■ Kamerun ■ Nigeria
Gorila grauer	<i>Gorilla beringei graueri</i>	■ RDK
Gorila gunung	<i>Gorilla beringei beringei</i>	■ RDK ■ Rwanda ■ Uganda
Gorila dataran rendah barat	<i>Gorilla gorilla gorilla</i>	■ Angola ■ Kamerun ■ Republik Afrika Tengah ■ Guinea Khatulistiwa ■ Gabon ■ Republik Kongo
Marga <i>Pongo</i>		
Orang utan timur laut borneo	<i>Pongo pygmaeus morio</i>	■ Indonesia ■ Malaysia
Orang utan barat laut borneo	<i>Pongo pygmaeus pygmaeus</i>	■ Indonesia ■ Malaysia
Orang utan barat daya borneo	<i>Pongo pygmaeus wurmbii</i>	■ Indonesia
Orang utan sumatera	<i>Pongo abelii</i>	■ Indonesia
Orang utan tapanuli	<i>Pongo tapanuliensis</i>	■ Indonesia

► OWA (tidak termasuk subspecies)

Marga <i>Hoolock</i>		
Hoolock timur	<i>Hoolock leuconedys</i>	■ Tiongkok ■ Myanmar
Hoolock gaoligong/ hoolock skywalker	<i>Hoolock tianxing</i>	■ Tiongkok ■ Myanmar
Hoolock barat	<i>Hoolock hoolock</i>	■ Bangladesh ■ India ■ Myanmar
Marga <i>Hylobates</i>		
Owa abu-abu abbott	<i>Hylobates abbotti</i>	■ Indonesia ■ Malaysia
Owa agile (owa lengan hitam)	<i>Hylobates agilis</i>	■ Indonesia ■ Malaysia
Owa abu-abu borneo (owa abu-abu utara)	<i>Hylobates funereus</i>	■ Brunei ■ Indonesia ■ Malaysia
Owa janggut putih borneo	<i>Hylobates albibarbis</i>	■ Indonesia
Owa kloss (bilou/owa mentawai)	<i>Hylobates klossii</i>	■ Indonesia
Owa lar (owa lengan putih)	<i>Hylobates lar</i>	■ Indonesia ■ Laos ■ Malaysia ■ Myanmar ■ Thailand
Owa moloch (owa jawa/owa perak)	<i>Hylobates moloch</i>	■ Indonesia
Owa müller (owa abu-abu müller/owa abu-abu selatan)	<i>Hylobates muelleri</i>	■ Indonesia
Owa pileated (owa bertopi/owa bermahkota)	<i>Hylobates pileatus</i>	■ Kamboja ■ Laos ■ Thailand
Marga <i>Nomascus</i>		
Owa cao vit (owa jambul hitam timur)	<i>Nomascus nasutus</i>	■ Tiongkok ■ Vietnam
Owa hainan (owa jambul hitam hainan/owa hitam hainan/ owa jambul hainan)	<i>Nomascus hainanus</i>	■ Tiongkok (Pulau Hainan)
Owa jambul pipi putih utara (owa pipi putih utara/ owa pipi putih)	<i>Nomascus leucogenys</i>	■ Laos ■ Vietnam
Owa jambul pipi kuning utara (owa pipi kuning utara)	<i>Nomascus annamensis</i>	■ Kamboja ■ Laos ■ Vietnam
Owa jambul pipi putih selatan (owa pipi putih selatan)	<i>Nomascus siki</i>	■ Laos ■ Vietnam
Owa jambul pipi kuning selatan (owa pipi merah, owa pipi kuning)	<i>Nomascus gabriellae</i>	■ Kamboja ■ Vietnam
Owa jambul hitam barat (owa jambul hitam, owa hitam, owa satu warna, owa indochina)	<i>Nomascus concolor</i>	■ Tiongkok ■ Laos ■ Vietnam
Marga <i>Symphalangus</i>		
Siamang	<i>Symphalangus syndactylus</i>	■ Indonesia ■ Malaysia ■ Thailand

Diproduksi kembali dari Volume 4, *Negara Kera: Pembunuhan, Penangkapan, Perdagangan*, 'Kera: Sebuah Tinjauan Umum'.

Singkatan dan Akronim

CCFU	Cross-Cultural Foundation of Uganda (Yayasan Lintas Budaya Uganda)
CITES	Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora (Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam Punah)
GRASP	Great Apes Survival Partnership (Kemitraan Kelangsungan Hidup Kera Besar)
ICCWC	International Consortium on Combatting Wildlife Crime (Konsorsium Internasional untuk Memerangi Kejahatan terhadap Satwa Liar)
IFAW	International Fund for Animal Welfare (Dana Internasional untuk Kesejahteraan Satwa)
IUCN	International Union for Conservation of Nature (Uni Internasional untuk Konservasi Alam)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
OECD	Organisation for Economic Co-Operation and Development (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi)
UNGA	United Nations General Assembly (Majelis Umum PBB)
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime (Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan)
UNOTC	United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB untuk Menanggulangi Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara)
WCO	World Customs Organization (Organisasi Kepabeanan Dunia)
WCS	Wildlife Conservation Society
WWF	World Wildlife Fund

Daftar Pustaka

- Ancrenaz, M., Dabek, L., dan O'Neil, S. (2007). The costs of exclusion: recognizing a role for local communities in biodiversity conservation. *PLoS Biology*, 5(11), e289. DOI: 10.1371/journal.pbio.0050289.
- Auzel, P. dan Wilkie, D.S. (2000). Wildlife use in northern Congo: hunting in a commercial logging concession. Dalam *Hunting for Sustainability in Tropical Forests*, ed. J.G. Robinson dan E. Bennett. Kota New York, New York: Columbia University Press, hal. 413–26.
- Baker, J., Milner-Gulland, E.J., dan Leader-Williams, N. (2012). Park gazette-ment and integrated conservation and development as factors in community conflict at Bwindi Impenetrable Forest, Uganda: drivers of community conflict at Bwindi. *Conservation Biology*, 26(1), 160–70. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2011.01777.x.
- Beaune, D. (2015). What would happen to the trees and lianas if apes disappeared? *Oryx*, 49(3), 442–6. DOI: 10.1017/S0030605314000878.
- Blomley, T., Namara, A., McNeillage, A., et al. (2010). *Development and Gorillas? Assessing Fifteen Years of Integrated Conservation and Development in South-Western Uganda*. London, Inggris: International Institute for Environment and Development (IIED). Tersedia di: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Man-Dev-676.1-001.pdf>.
- Booker, F. dan Roe, D. (2017). *First Line of Defence? A Review of Evidence of the Effectiveness of Engaging Communities to Tackle Illegal Wildlife Trade*. London, Inggris: International Institute for Environment and Development (IIED).
- Bowen-Jones, E. (2012). *Tackling Human–Wildlife Conflict: A Prerequisite for Linking Conservation and Poverty Alleviation. A Decision-Makers Guide to Financial and Institutional Mechanisms*. London, Inggris: International Institute for Environment and Development (IIED). Tersedia di: <https://pubs.iied.org/pdfs/G03725.pdf>.
- Brashares, J.S., Golden, C.D., Weinbaum, K.Z., Barrett, C.B., dan Okello, G.V. (2011). Economic and geographic drivers of wildlife consumption in rural Africa. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(34), 13931–6. DOI: 10.1073/pnas.1011526108.
- Brockelman, W. dan Geissmann, T. (2019). *Hoolock leuconedys*. The IUCN Red List of Threatened Species. 2019: e.T118355453A17968300. Gland, Swiss: International Union for Conservation of Nature (IUCN). Tersedia di: <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-1.RLTS.T118355453A17968300.en>.
- Brown, D., Fa, J.E., dan Gordon, L. (2007). *Assessment of Recent Bushmeat Research and Recommendations to Her Majesty's Government*. London, Inggris: Overseas Development Institute (ODI). Tersedia di: <http://cite.seerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?sessionid=031C5711AC90538F2E3306418A13B1A?doi=10.1.1.617.1723&rep=rep1&type=pdf>.
- Brown, S. (2006). The West develops a taste for bushmeat. *New Scientist Life*, Juli 8, 2006. Tersedia di: <https://www.newscientist.com/article/dn9503-the-west-develops-a-taste-for-bushmeat/>.
- Campbell, G., Kueh, H., Diarrassouba, A., N'Goran, P.K., dan Boesch, C. (2011). Long-term research sites as refugia for threatened and over-harvested species. *Biology Letters*, 7(5), 723–6. DOI: 10.1098/rsbl.2011.0155.
- Campbell-Smith, G., Simanorang, H.V.P., Leader-Williams, N., dan Linkie, M. (2010). Local attitudes and perceptions toward crop-raiding by orang-utans (*Pongo abelii*) and other nonhuman primates in northern Sumatra, Indonesia. *American Journal of Primatology*, 72(10), 866–76. DOI: 10.1002/ajp.20822.
- Carlsen, F., Leus, K., Traylor-Holzer, K., dan McKenna, A. (2012). *Western Chimpanzee Population and Habitat Viability Assessment for Sierra Leone: Final Report*. Copenhagen: International Union for Conservation of Nature (IUCN) Species Survival Commission (SSC) Conservation Breeding Specialist Group (CBSG)-Eropa.
- Cawthorn, D.-M. dan Hoffman, L.C. (2015). The bushmeat and food security nexus: a global account of the contributions, conundrums and ethical collisions. *Food Research International*, 76, 906–25. DOI: 10.1016/j.foodres.2015.03.025.
- CCFU (2018). Culture and the Conservation of the Great Apes in Uganda. Kampala: Cross-Cultural Foundation of Uganda (CCFU). Tersedia di: <http://crossculturalfoundation.or.ug/wp-content/uploads/2018/07/Culture-and-Conservation-of-the-great-apes-in-Uganda-CCFU2018.pdf>.
- Chaber, A.-L., Allebone-Webb, S., Lignereux, Y., Cunningham, A.A., dan Rowcliffe, J.M. (2010). The scale of illegal meat importation from Africa to Europe via Paris. *Conservation Letters*, 3(5), 317–21. DOI: 10.1111/j.1755-263X.2010.00121.x.
- Challender, D.W.S. dan MacMillan, D.C. (2014). Poaching is more than an enforcement problem. *Conservation Letters*, 7(5), 484–94. DOI: 10.1111/conl.12082.
- Cheyne, S.M. (2010). Behavioural ecology of gibbons (*Hylobates albobarbis*) in a degraded peat-swamp forest. Dalam *Indonesian Primates*, ed. S. Gursky dan J. Supriatna. Kota New York, New York: Springer, hal. 121–56. DOI: 10.1007/978-1-4419-1560-3_8.
- Cheyne, S.M. (n.d.). *The impact of social media on the trafficking of small apes*. Presentasi tidak dipublikasikan.
- CITES (2019). *Resolution Conf. 13.4 (Rev. CoP18) Conservation of and Trade in Great Apes*. Jenewa, Swiss: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Tersedia di: <https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-13-04-R18.pdf>.
- CITES dan GRASP (2006). *CITES/GRASP Orang-utan Technical Mission Indonesia. 8–12 May, 2006*. Jenewa, Swiss: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)–Great Apes Survival Partnership (GRASP). Tersedia di: https://cites.org/sites/default/files/common/prog/ape/ID_mission06.pdf.
- Clarke, R.V. (2009). Situational crime prevention: theoretical background and current practice. Dalam *Handbook on Crime and Deviance*, ed. M. D. Krohn, A. J. Lizotte, dan G. Penly. Kota New York, New York: Springer, hal. 259–76.
- Clough, C. dan May, C. (2018). *Illicit Financial Flows and the Illegal Trade in Great Apes*. Washington DC: Global Financial Integrity (GFI). Tersedia di:

- <https://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2018/10/GFI-Ilicit-Financial-Flows-and-the-Illegal-Trade-in-Great-Apes.pdf>.
- Coad, L., Fa, J., Abernethy, K., *et al.* (2019). *Towards a Sustainable, Participatory and Inclusive Wild Meat Sector*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR). Tersedia di: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BCoad1901.pdf.
- Cook, D., Roberts, M., dan Lowther, J. (2002). *The International Wildlife Trade and Organised Crime*. World Wide Fund for Nature (WWF)/TRAFFIC report. Wolverhampton, Inggris: Regional Research Institute, University of Wolverhampton.
- Cooney, R., Roe, D., Dublin, H., dan Booker, F. (2018). *Wild Life, Wild Livelihoods: Involving Communities in Sustainable Wildlife Management and Combatting the Illegal Wildlife Trade*. Nairobi, Kenya: United Nations Environment Programme (UNEP). Tersedia di: http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22864/WLWL_Report_web.pdf.
- Cooney, R., Roe, D., Dublin, H., *et al.* (2017). From poachers to protectors: engaging local communities in solutions to illegal wildlife trade. *Conservation Letters*, 10(3), 367–74. DOI: 10.1111/conl.12294.
- Davis, J.T., Mengersen, K., Abram, N.K., *et al.* (2013). It's not just conflict that motivates killing of orangutans. *PLoS ONE*, 8(10), e75373. DOI: 10.1371/journal.pone.0075373.
- de Merode, E. dan Cowlishaw, G. (2006). Species protection, the changing informal economy, and the politics of access to the bushmeat trade in the Democratic Republic of Congo. *Conservation Biology*, 20(4), 1262–71. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2006.00425.x.
- Drani, E. dan Infield, M. (2014). *Cultural values in conservation: traditional values and practices that impact on ape conservation and welfare*. Tulisan latar belakang yang tidak dipublikasikan. Diberi kuasa oleh Arcus Foundation.
- Drewry, R. (1997). Ecotourism: can it save the orangutans? *Inside Indonesia*, 51, 15–8.
- Duckworth, J.W. (2008). *Preliminary gibbon status review for Lao PDR 2008*. Laporan tidak dipublikasikan. Hanoi, Vietnam dan Cambridge, Inggris: Fauna and Flora International (FFI). Tersedia di: <https://www.issuelab.org/resources/10668/10668.pdf>.
- Duffy, R. dan St John, F.A.V. (2013). *Poverty, poaching and trafficking: what are the links?* UK: Bukti Permintaan. DOI: 10.12774/eod_hdo59.jun2013.duffy.
- Duffy, R., St John, F.A.V., Büscher, B., dan Brockington, D. (2016). Toward a new understanding of the links between poverty and illegal wildlife hunting. *Conservation Biology*, 30(1), 14–22. DOI: 10.1111/cobi.12622.
- Dunay, E., Apakupakul, K., Leard, S., Palmer, J. L., dan Deem, S. L. (2018). Pathogen transmission from humans to great apes is a growing threat to primate conservation. *EcoHealth*, 15(1), 148–162. DOI: 10.1007/s10393-017-1306-1.
- Espinosa, S., Branch, L.C., dan Cueva, R. (2014). Road development and the geography of hunting by an Amazonian indigenous group: consequences for wildlife conservation. *PLoS ONE*, 9(12), e114916. DOI: 10.1371/journal.pone.0114916.
- Fa, J.E., Ryan, S.F., dan Bell, D.J. (2005). Hunting vulnerability, ecological characteristics and harvest rates of bushmeat species in Afrotropical forests. *Biological Conservation*, 121(2), 167–76. DOI: 10.1016/j.biocon.2004.04.016.
- Fan, P.-F., Ren, G.-P., Wang, W., *et al.* (2013). Habitat evaluation and population viability analysis of the last population of Cao Vit gibbon (*Nomascus nasutus*): implications for conservation. *Biological Conservation*, 161, 39–47. DOI: 10.1016/j.biocon.2013.02.014.
- Felbab-Brown, V. (2017). *The Extinction Market. Wildlife Trafficking and How to Counter It*. London, Inggris: Hurst and Company.
- Felbab-Brown, V. (2018). To counter wildlife trafficking, local enforcement, not en-route interdiction, is key. *Mongabay*, 20 Januari 2018. Tersedia di: <https://news.mongabay.com/2018/01/to-counter-wildlife-trafficking-local-enforcement-not-en-route-interdiction-is-key-commentary/>.
- Furuichi, T., Idani, G., Ihobe, H., *et al.* (1998). Population dynamics of wild bonobos (*Pan paniscus*) at Wamba. *International Journal of Primatology*, 19(6), 1029–43. DOI: 10.1023/A:1020326304074.
- Gettleman, J. (2017). Smuggled, beaten and drugged: the illicit global ape trade. *New York Times*, 4 November 2017. Tersedia di: <https://www.nytimes.com/2017/11/04/world/africa/ape-trafficking-bonobos-orangutans.html>.
- Gillespie, T.R., Nunn, C.L., dan Leendertz, F.H. (2008). Integrative approaches to the study of primate infectious disease: implications for biodiversity conservation and global health. *American Journal of Physical Anthropology*, 137(S47), 53–69. DOI: 10.1002/ajpa.20949.
- Greengrass, E. (2015). Commercial hunting to supply urban markets threatens mammalian biodiversity in Sapo National Park. *Oryx*, 50(3), 397–404. DOI: 10.1017/S0030605315000095.
- Hahn, B.H., Shaw, G.M., De Cock, K.M., dan Sharp, P.M. (2000). AIDS as a zoonosis: scientific and public health implications. *Science*, 287(5453), 607–14. DOI: 10.1126/science.287.5453.607.
- Harris, D. dan Karamahmedovic, A. (2009). Bushmeat sold on open market in US. *ABC News*, 11 Desember 2009. Tersedia di: <https://abcnews.go.com/Nightline/IntoTheWild/bushmeat-africa-sold-open-market-us/story?id=9312518>.
- Harrison, M., Roe, D., Baker, J., *et al.* (2015). *Wildlife Crime: A Review of the Evidence on Drivers and Impacts in Uganda*. London, Inggris: International Institute for Environment and Development (IIED). Tersedia di: <https://pubs.iied.org/pdfs/17576IIED.pdf>.
- Harrison, R.D., Sreekar, R., Brodie, J.F., *et al.* (2016). Impacts of hunting on tropical forests in Southeast Asia. *Conservation Biology*, 30(5), 972–81. DOI: 10.1111/cobi.12785.
- Hastie, J. dan McCrea-Steele, T. (2014). *Wanted – Dead or Alive. Exposing Online Wildlife Trade*. London, Inggris: International Fund for Animal Welfare (IFAW). Tersedia di: <https://www.ifaw.org/uk/resources/wanted-dead-or-alive-report>.
- Hawdon, J. dan Ryan, J. (2011). Neighborhood organizations and resident assistance to police. *Sociological Forum*, 26 (4), 897–920.
- Hickey, G.M., Pouliot, M., Smith-Hall, C., Wunder, S., dan Nielsen, M.R. (2016). Quantifying the economic contribution of wild food harvests to rural livelihoods: a global-comparative analysis. *Food Policy*, 62, 122–32. DOI: 10.1016/j.foodpol.2016.06.001.
- Hickey, J.R., Nackoney, J., Nibbelink, N.P., *et al.* (2013). Human proximity and habitat fragmentation are key drivers of the rangewide bonobo distribution. *Biodiversity and Conservation*, 22(13), 3085–104. DOI: 10.1007/s10531-013-0572-7.
- Hockings, K. dan Humle, T. (2009). *Best Practice Guidelines for the Prevention and Mitigation of Conflict Between Humans and Great Apes*. Gland, Swiss: International Union for Conservation of Nature (IUCN) Species Survival Commission (SSC), Primate Specialist Group. Tersedia di: <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/ssc-op-037.pdf>.
- Hockings, K.J. dan McLennan, M.R. (2012). From forest to farm: systematic review of cultivar feeding by chimpanzees – management implications for wildlife in anthropogenic landscapes. *PLoS ONE*, 7(4), e33391. DOI: 10.1371/journal.pone.0033391.
- Holmern, T., Muya, J., dan Røskft, E. (2007). Local law enforcement and illegal bushmeat hunting outside the Serengeti National Park, Tanzania. *Environmental Conservation*, 34(1), 55–63. DOI: 10.1017/S0376892907003712.
- Hoppe, E., Pauly, M., Gillespie, T.R., *et al.* (2015). Multiple cross-species transmission events of human adenoviruses (HAdV) during hominine evolution. *Molecular Biology and Evolution*, 32(8), 2072–84. DOI: 10.1093/molbev/msv090.
- ICCWC (2016). ICCWC Indicator Framework for Combating Wildlife and Forest Crime: A Self-Assessment Framework for National Use. Jenewa, Swiss: International Consortium on Combatting Wildlife Crime. Tersedia di: <https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/E->

- ICCWC-Ind-FW-Assessment_guidelines_and_template_clickable-final.pdf.
- ICCWC (2018). *Menu of Services*. Jenewa, Swiss: International Consortium on Combatting Wildlife Crime. Tersedia di: https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/ICCWC_menu_of_services-revApril18.pdf.
- IFAW (2008). *Killing with Keystrokes*. Yarmouth Port, MA: International Fund for Animal Welfare (IFAW). Tersedia di: https://dijyxxz9imt9yb.cloudfront.net/resource/202/attachment/regular/Killing_with_Keystrokes.pdf.
- IFAW (2014). *Wanted – Dead or Alive: Exposing Online Wildlife Trade*. London, Inggris: International Fund for Animal Welfare (IFAW). Tersedia di: <https://dijyxxz9imt9yb.cloudfront.net/resource/251/attachment/original/IFAW-Wanted-Dead-or-Alive-Exposing-Online-Wildlife-Trade-2014.pdf>.
- Instagram (2017). Protecting wildlife and nature from exploitation. *Info Center*, 4 Desember 2017. Tersedia di: <https://instagram-press.com/blog/2017/12/04/protecting-wildlife-and-nature-from-exploitation/>.
- INTERPOL (2020). *Wildlife Crime Linked to the Internet: Practical Guidelines for Law Enforcement Practitioners*. Lyon, Prancis: INTERPOL. Tersedia di: https://cites.org/sites/default/files/EST/INTERPOL_Guidelines-Wildlife_Crime_Linked_to_Internet-March2020-PUBLIC.pdf.
- INTERPOL dan WCO (2018). *Customs–Police Cooperation Handbook*. Lyon, Prancis: INTERPOL and Brussels, Belgia: World Customs Organization. Tersedia di: https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/enforcement/CustomsPoliceCoopHandbook_EN_LR.pdf.
- Kalpers, J., Williamson, E.A., Robbins, M.M., *et al.* (2003). Gorillas in the crossfire: population dynamics of the Virunga mountain gorillas over the past three decades. *Oryx*, 37(3), 326–37. DOI: 10.1017/S0030605303000589.
- Karesh, W.B., Cook, R.A., Bennett, E.L., dan Newcomb, J. (2005). Wildlife trade and global disease emergence. *Emerging Infectious Diseases*, 11(7), 1000–2. DOI: 10.3201/eid1107.050194.
- Kheng, V., Zichello, J.M., Lumbantobing, D.N., *et al.* (2018). Phylogeography, population structure, and conservation of the Javan gibbon (*Hylobates moloch*). *International Journal of Primatology*, 39(1), 5–26. DOI: 10.1007/s10764-017-0005-7.
- Kramer, R., Sawyer, R., Amato, S., dan LaFontaine, P. (2017). *The US Elephant Ivory Market: A New Baseline*. Washington DC: TRAFFIC. Tersedia di: http://www.trafficj.org/publication/17_The_US_Elephant_Ivory_Market.pdf.
- Krishnasamy, K. dan Stoner, S. (2016). *Trading Faces: A Rapid Assessment on the use of Facebook to Trade Wildlife in Peninsular Malaysia*. Petaling Jaya, Malaysia: TRAFFIC. Tersedia di: <https://www.traffic.org/site/assets/files/2434/trading-faces-facebook-malasia.pdf>.
- Kuehl, H.S., Nzeingui, C., Yeno, S.L.D., *et al.* (2009). Discriminating between village and commercial hunting of apes. *Biological Conservation*, 142, 1500–6.
- Kümpel, N.F., Milner-Gulland, E.J., Cowlshaw, G., dan Rowcliffe, J.M. (2010). Incentives for hunting: the role of bushmeat in the household economy in rural Equatorial Guinea. *Human Ecology*, 38(2), 251–64. DOI: 10.1007/s10745-010-9316-4.
- Lanjouw, A. (2015). Economic development and conservation of biodiversity: understanding the interface of ape conservation and industrial agriculture. Dalam *State of the Apes: Industrial Agriculture and Ape Conservation*, ed. Arcus Foundation. Cambridge, Inggris: Cambridge University Press, hal. 13–39.
- Laurance, W.F., Croes, B.M., Guisouegou, N., *et al.* (2008). Impacts of roads, hunting, and habitat alteration on nocturnal mammals in African rainforests. *Conservation Biology*, 22(3), 721–32. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2008.00917.x.
- Legal Atlas (n.d.). *Home*. Missoula, Montana: Legal Atlas. Tersedia di: <http://www.legal-atlas.com/>. Diakses pada September 2020.
- Leighton, M. (1993). Modelling dietary selectivity by Bornean orangutans: evidence of multiple criteria in fruit selection. *International Journal of Primatology*, 14(2), 257–313.
- Lindsey, P., Balme, G., Becker, M., *et al.* (2012). *Illegal Hunting and the Bush-Meat Trade in Savanna Africa: Drivers, Impacts and Solutions to Address the Problem*. Kota New York, New York: Panthera.
- Linkie, M., Martyr, D.J., Harihar, A., *et al.* (2015). Editor's choice: safeguarding Sumatran tigers: evaluating effectiveness of law enforcement patrols and local informant networks. *Journal of Applied Ecology*, 52(4), 851–60. DOI: 10.1111/1365-2664.12461.
- Macfie, E.J. dan Williamson, E.A. (2010). *Best Practice Guidelines for Great Ape Tourism*. Gland, Swiss: International Union for Conservation of Nature (IUCN) Species Survival Commission (SSC), Primate Specialist Group. Tersedia di: <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/SSC-OP-038.pdf>.
- Maisels, F., Strindberg, S., Blake, S., *et al.* (2013). Devastating decline of forest elephants in central Africa. *PLoS ONE*, 8(3), e59469. DOI: 10.1371/journal.pone.0059469.
- Malone, N.M., Fuentes, A., Purnama, A.R., dan Adi Putra, I.M.W. (2003). Displaced Hylobatids: biological, cultural, and economic aspects of the primate trade in Java and Bali, Indonesia. *Tropical Biodiversity*, 8(1), 41–9.
- Marshall, A.J., Nardiyono, Engström, L.M., *et al.* (2006). The blowgun is mightier than the chainsaw in determining population density of Bornean orangutans (*Pongo pygmaeus morio*) in the forests of East Kalimantan. *Biological Conservation*, 129(4), 566–78. DOI: 10.1016/j.bibcon.2005.11.025.
- Meijaard, E., Albar, G., Nardiyono, *et al.* (2010a). Unexpected ecological resilience in Bornean orangutans and implications for pulp and paper plantation management. *PLoS ONE*, 5(9), e12813. DOI: 10.1371/journal.pone.0012813.
- Meijaard, E., Buchori, D., Hadiprakarsa, Y., *et al.* (2011). Quantifying killing of orangutans and human–orangutan conflict in Kalimantan, Indonesia. *PLoS ONE*, 6(11), e27491. DOI: 10.1371/journal.pone.0027491.
- Meijaard, E., Welsh, A., Ancrenaz, M., *et al.* (2010b). Declining orangutan encounter rates from Wallace to the present suggest the species was once more abundant. *PLoS ONE*, 5(8), e12042. DOI: 10.1371/journal.pone.0012042.
- Milner-Gulland, E.J., dan Rowcliffe, J.M. (2007). *Conservation and Sustainable Use*. Oxford, Inggris: Oxford University Press.
- Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., dan Wilson, D.E., ed. (2013). *Handbook of the Mammals of the World. Volume 3: Primates*. Barcelona, Spanyol: Lynx Edicions.
- Moneron, S., Armstrong, A., dan Newton, D. (2020). *The People Beyond the Poaching*. Cambridge, Inggris: TRAFFIC. Tersedia di: <https://www.traffic.org/site/assets/files/13210/web-beyond-the-poaching-offender-survey.pdf>.
- Nforngwa, E. (2017). Trade in skulls, body parts severely threatens Cameroon's great apes. *Mongabay*, 19 Januari 2017. Tersedia di: <https://news.mongabay.com/2017/01/trade-in-skulls-body-parts-severely-threatens-camerouns-great-apes/>.
- Nijman, V. (2005). *Hanging in the Balance: An Assessment of Trade in Orang-Utans and Gibbons on Kalimantan, Indonesia*. Petaling Jaya, Malaysia: TRAFFIC Southeast Asia. Tersedia di: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Traf-092.pdf>.
- Nijman, V. (2009). *An Assessment of Trade in Gibbons and Orang-Utans in Sumatra, Indonesia*. Petaling Jaya, Malaysia: TRAFFIC Southeast Asia. Tersedia di: <https://www.traffic.org/site/assets/files/3986/sumatran-gibbons-orangutans.pdf>.
- Nijman, V. (2010). An overview of international wildlife trade from Southeast Asia. *Biodiversity and Conservation*, 19(4), 1101–14. DOI: 10.1007/s10531-009-9758-4.
- Nijman, V., Yang Martinez, C.F., dan Shepherd, C.R. (2009). Saved from trade: donated and confiscated gibbons in zoos and rescue centres in Indonesia. *Endangered Species Research*, 9, 151–7.
- Núñez-Iturri, G. dan Howe, H.F. (2007). Bushmeat and the fate of trees with seeds dispersed by large primates in a lowland rain forest in western Amazonia. *Biotropica*, 39(3), 348–54. DOI: 10.1111/j.1744-7429.2007.00276.x.

- Oates, J.F., Sunderland-Groves, J., Bergl, R., *et al.* (2007). *Regional Action Plan for the Conservation of the Cross River Gorilla* (Gorilla gorilla diehli). Gland, Swiss dan Arlington, Virginia: International Union for Conservation of Nature (IUCN) Species Survival Commission (SSC), Primate Specialist Group, and Conservation International. Tersedia di: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2007-012.pdf>.
- OECD (2009). *Determination and Application of Administrative Fines for Environmental Offences: Guidance for Environmental Enforcement Authorities in EECCA Countries*. Paris, Prancis: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Tersedia di: <https://www.oecd.org/env/outreach/42356640.pdf>.
- Petre, C.-A., Tagg, N., Hauriez, B., *et al.* (2013). Role of the western lowland gorilla (*Gorilla gorilla gorilla*) in seed dispersal in tropical forests and implications of its decline. *Biotechnology, Agronomy, Society and Environment*, 17(3), 517–26.
- Phassaraudomsak, M. dan Krishnasamy, K. (2018). *Trading Faces: A Rapid Assessment on the Use of Facebook to Trade in Wildlife in Thailand*. Petaling Jaya, Malaysia: TRAFFIC. Tersedia di: https://www.traffic.org/site/assets/files/11073/trading_faces_thailand_2019.pdf.
- Poulsen, J.R., Clark, C.J., dan Bolker, B.M. (2011). Decoupling the effects of logging and hunting on an Afrotropical animal community. *Ecological Applications*, 21(5), 1819–36.
- Poulsen, J.R., Clark, C.J., Mavah, G., dan Elkan, P.W. (2009). Bushmeat supply and consumption in a tropical logging concession in northern Congo. *Conservation Biology*, 23(6), 1597–608. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2009.01251.x.
- Richard, L., Mouinga-Ondeme, A., Betsem, E., *et al.* (2016). Zoonotic transmission of two new strains of human T-lymphotropic virus type 4 in hunters bitten by a gorilla in Central Africa. *Clinical Infectious Diseases*, 63(6), 800–3. DOI: 10.1093/cid/ciw389.
- Robbins, A.M., Gray, M., Basabose, A., *et al.* (2013). Impact of male infanticide on the social structure of mountain gorillas. *PLoS ONE*, 8(11), 1–10. DOI: 10.1371/journal.pone.0078256.
- Robertson, S. (2017). Why law enforcement is essential to stopping illegal wildlife trade. *World Bank Blogs*, 27 Juli 2017. Tersedia di: <https://blogs.worldbank.org/voices/why-law-enforcement-essential-stopping-illegal-wildlife-trade>.
- Robinson, J.G. dan Bennett, E.L. (2004). Having your wildlife and eating it too: an analysis of hunting sustainability across tropical ecosystems. *Animal Conservation*, 7(4), 397–408. DOI: 10.1017/s1367943004001532.
- Rodriguez, M., Pascual, M., Wingard, J., *et al.* (2019). *Legal Protection of Great Apes & Gibbons: Country Profiles for 17 Range Countries*. Missoula, Montana: Legal Atlas. Tersedia di: https://www.legal-atlas.com/uploads/2/6/8/4/26849604/apes_legal_protection_feb_2019_.pdf.
- Roe, D. dan Booker, F. (2019). Engaging local communities in tackling illegal wildlife trade: a synthesis of approaches and lessons for best practice. *Conservation Science and Practice*, 1(5), e26. DOI: 10.1111/csp2.26.
- Rovero, F., Mtui, A., Kitegile, A., *et al.* (2015). Primates decline rapidly in unprotected forests: evidence from a monitoring program with data constraints. *PLoS ONE*, 10(2), e0118330. DOI: 10.1371/journal.pone.0118330.
- Russell, C. (2001). Primate-focused ecotourism: proceed with caution. *Laboratory Primate Newsletter*, 40(4), 7–8.
- Shukman, D. dan Piranty, S. (2017). The secret trade in baby chimps. *BBC News Science and Environment*, 30 Januari 2017. Tersedia di: <https://www.bbc.co.uk/news/resources/1dt-5e8c4bac-c236-4cd9-bacc-db96d733f6cf>.
- Smith, J. dan Cheyne, S.M. (2017). *Investigating the extent and prevalence of gibbons being traded online in habitat countries: a preliminary report for Arcus Foundation*. Oxford, Inggris: Oxford Brookes University.
- Smith, J.H., King, T., Campbell, C., Cheyne, S.M., dan Nijman, V. (2018). Modelling population viability of three independent Javan gibbon (*Hylobates moloch*) populations on Java, Indonesia. *Folia Primatologica*, 88(6), 507–22. DOI: 10.1159/000484559.
- Spehar, S.N., Sheil, D., Harrison, T., *et al.* (2018). Orangutans venture out of the rainforest and into the Anthropocene. *Science Advances*, 4(6), 1–13. DOI: 10.1126/sciadv.1701422.
- Stiles, D. (2016). *The Illegal Trade in Great Apes. A Report Prepared by the Project to End Great Ape Slavery (PEGAS)*. Johannesburg, Afrika Selatan. Tersedia di: <https://freetheapes.files.wordpress.com/2014/11/cop17-report.pdf>.
- Stiles, D., Redmond, I., Cress, D., Nellemann, C., dan Formo, R.K. (2013). *Stolen Apes: The Illicit Trade in Chimpanzees, Gorillas, Bonobos and Orangutans. A Rapid Response Assessment*. Arendal, Swedia: United Nations Environment Programme and GRID-Arendal. Tersedia di: <https://www.grida.no/publications/191>.
- Stokes, D. (2017). Pileated gibbons poached as bushmeat to feed illegal rosewood loggers. *Mongabay*, 17 Januari 2017. Tersedia di: <https://news.mongabay.com/2017/01/pileated-gibbons-poached-as-bushmeat-to-feed-illegal-rosewood-loggers/>.
- Sugiyama, Y. dan Fujita, S. (2011). The demography and reproductive parameters of Bossou chimpanzees. Dalam *The Chimpanzees of Bossou and Nimba*, ed. T. Matsuzawa, T. Humle, dan Y. Sugiyama. Tokyo, Jepang: Springer, hal. 23–34. DOI: 10.1007/978-4-431-53921-6_4.
- Tagg, N., Willie, J., Duarte, J., Petre, C.A., dan Fa, J.E. (2015). Conservation research presence protects: a case study of great ape abundance in the Dja region, Cameroon. *Animal Conservation*, 18(6), 489–98. DOI: 10.1111/acv.12212.
- The Coalition (2020). *Offline and in the Wild: A Progress Report of the Coalition to End Wildlife Trafficking Online*. Coalition to End Wildlife Trafficking Online. Tersedia di: <https://www.endwildlifetraffickingonline.org/our-progress>.
- TRAFFIC (2008). *What's Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade and Trade Control Efforts in Cambodia, Indonesia, Lao PDR and Vietnam*. East Asia and Pacific Region Sustainable Development Discussion Papers. Washington DC: East Asia and Pacific Region Sustainable Development Department, World Bank. Tersedia di: http://www.trafficj.org/publication/o8_what%27s_driving_the_wildlife_trade.pdf.
- Tranquilli, S., Abedi-Lartey, M., Amsini, F., *et al.* (2012). Lack of conservation effort rapidly increases African great ape extinction risk. *Conservation Letters*, 5(1), 48–55. DOI: 10.1111/j.1755-263X.2011.00211.x.
- Turvey, S.T., Bruun, K., Ortiz, A., *et al.* (2018). New genus of extinct Holocene gibbon associated with humans in Imperial China. *Science*, 360(6395), 1346–9. DOI: 10.1126/science.aao4903.
- Turvey, S.T., Traylor-Holzer, K., Wong, M.H.G., *et al.* (2015). *International Conservation Planning Workshop for the Hainan Gibbon: Final Report*. London/Apple Valley, Minnesota: Zoological Society of London/International Union for Conservation of Nature (IUCN) Species Survival Commission (SSC) Conservation Breeding Specialist Group. Tersedia di: https://www.cpsg.org/sites/cbsg.org/files/documents/Hainan_Gibbon_Workshop_Report.pdf.
- Tutin, C.E.G., Fernandez, M., Rogers, M.E., *et al.* (1991). Foraging profiles of sympatric lowland gorillas and chimpanzees in the Lope Reserve, Gabon. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B: Biological Sciences*, 334(1270), 179–86. DOI: 10.1098/rstb.1991.0107.
- Twinamatsiko, M., Baker, J., Harrison, M., *et al.* (2014). *Linking Conservation, Equity and Poverty Alleviation: Understanding Profiles and Motivations of Resource Users and Local Perceptions of Governance at Bwindi Impenetrable National Park*. London, Inggris: International Institute for Environment and Development (IIED). Tersedia di: <https://pubs.iied.org/pdfs/14630IIED.pdf>.
- UNGA (2000). *A/RES/55/25. United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Resolution 55/25. Adopted November 15*. Kota New York, New York: United Nations General Assembly (UNGA). Tersedia di: https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_55_25-E.pdf.

- UNGA (2015). *A/RES/69/314. Tackling Illicit Trafficking in Wildlife* (19 August 2015). Resolution 69/314. Kota New York, New York: United Nations General Assembly (UNGA). Tersedia di: <https://undocs.org/en/A/RES/69/314>.
- UNODC (2012). *Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit*. Wina, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Tersedia di: http://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf.
- UNODC (2016). *World Wildlife Crime Report: Trafficking in Protected Species*. Wina, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Tersedia di: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf.
- UNODC (2018). *Guide on Drafting Legislation to Combat Wildlife Crime*. Wina, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Tersedia di: <https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/UNODC%20Guide%20on%20Drafting%20Legislation%20to%20Combat%20Wildlife%20Crime.pdf>.
- UNODC (2019). *Scaling Back Corruption: A Guide on Addressing Corrupt Wildlife Management Authorities*. Wina, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Tersedia di: https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2019/19-08373_Scaling_Back_Corruption_ebook.pdf.
- Utami-Atmoko, S., Traylor-Holzer, K., Rifqi, M.A., et al., ed. (2017). *Orangutan Population and Habitat Viability Assessment: Final Report*. Apple Valley, Minnesota: International Union for Conservation of Nature (IUCN) Species Survival Commission (SSC) Conservation Breeding Specialist Group.
- van Vliet, N. dan Mbazza, P. (2011). Recognizing the multiple reasons for bushmeat consumption in urban areas: a necessary step toward the sustainable use of wildlife for food in Central Africa. *Human Dimensions of Wildlife*, 16(1), 45–54. DOI: 10.1080/10871209.2010.523924.
- Vermeulen, C., Julve, C., Doucet, J.-L., dan Monticelli, D. (2009). Community hunting in logging concessions: towards a management model for Cameroon's dense forests. *Biodiversity and Conservation*, 18(10), 2705–18. DOI: 10.1007/s10531-009-9614-6
- Vining, J. dan Ebreo, A. (2002). Emerging theoretical and methodological perspectives on conservation behavior. Dalam *Handbook of Environmental Psychology*, ed. R. B. Bechtel dan A. Churchman. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc., hal. 541–58.
- Watts, D.P. (1989). Infanticide in mountain gorillas: new cases and a reconsideration of the evidence. *Ethology*, 81(1), 1–18. DOI: 10.1111/j.1439-0310.1989.tb00754.x.
- WCS Nigeria (n.d.). *My Gorilla – My Community*. Calabar, Nigeria: Wildlife Conservation Society (WCS) Nigeria. Tersedia di: <https://nigeria.wcs.org/Global-Initiatives/My-Gorilla-My-Community.aspx>. Accessed July 2019.
- Westphal, M.I., Browne, M., MacKinnon, K., dan Noble, I. (2008). The link between international trade and the global distribution of invasive alien species. *Biological Invasions*, 10(4), 391–8. DOI: 10.1007/s10530-007-9138-5.
- White, A. dan Fa, J.E. (2014). The bigger picture: indirect impacts of extractive industries on apes and ape habitat. Dalam *State of the Apes: Extractive Industries and Ape Conservation*, ed. Arcus Foundation. Cambridge, Inggris: Cambridge University Press, hal. 197–225.
- Wicander, S. dan Coad, L. (2018). Can the provision of alternative livelihoods reduce the impact of wild meat hunting in west and central Africa? *Conservation and Society*, 16(4), 441–58. DOI: 10.4103/cs.cs_17_56.
- Wich, S.A., Meijaard, E., Marshall, A.J., et al. (2008). Distribution and conservation status of the orang-utan (*Pongo spp.*) on Borneo and Sumatra: how many remain? *Oryx*, 42(3), 329–39. DOI: 10.1017/S003060530800197X.
- WildAid (2014). *Evidence of Declines in Shark Fin Demand China*. San Francisco, CA: WildAid. Tersedia di: https://wildaid.org/wp-content/uploads/2017/09/SharkReport_Evidence-of-Declines-in-Shark-Fin-Demand_China.pdf.
- WildAid (2015). *Rhino Horn Demand 2012–2014*. San Francisco, CA: WildAid. Tersedia di: https://wildaid.org/wp-content/uploads/2017/09/Rhino-Horn-Report_Final_v2.pdf.
- WildAid (2017). *2017 Annual Report*. San Francisco, CA: WildAid. Tersedia di: <https://wildaid.org/wp-content/uploads/2018/04/Annual-Report-2017.pdf>.
- WildAid (2018a). *Sharks in Crisis: Evidence of Positive Behavioral Change in China as New Threats Emerge*. San Francisco, California: WildAid. Tersedia di: <https://wildaid.org/wp-content/uploads/2018/02/WildAid-Sharks-in-Crisis-2018.pdf>.
- WildAid (2018b). *25 Years After China's Rhino Horn Ban, Poaching Persists*. San Francisco, California: WildAid. Tersedia di: <https://wildaid.org/wp-content/uploads/2018/09/25-Years-After-Chinas-Ban.pdf>.
- Wild for Life (tanpa tahun). *Champions*. Wild for Life. Tersedia di: <https://wildforlife.org/champions>.
- Wilkie, D.S. dan Carpenter, J.F. (1999). Bushmeat hunting in the Congo Basin: an assessment of impacts and options for mitigation. *Biodiversity and Conservation*, 8(7), 927–55. DOI: 10.1023/a:1008877309871.
- Wilkie, D., Shaw, E., Rotberg, F., Morelli, G., dan Auzel, P. (2000). Roads, development and conservation in the Congo basin. *Conservation Biology*, 14(6), 1614–22.
- Wilkie, D.S., Wieland, M., Boulet, H., et al. (2016). Eating and conserving bushmeat in Africa. *African Journal of Ecology*, 54(4), 402–14. DOI: 10.1111/aje.12392.
- WWF (tanpa tahun). *Coalition to End Wildlife Trafficking Online*. Washington DC: World Wildlife Fund (WWF). Tersedia di: <https://www.worldwildlife.org/pages/coalition-to-end-wildlife-trafficking-online>. Diakses pada Oktober 2019.

Perdagangan ilegal kera hidup, daging, dan bagian tubuhnya terjadi di semua negara yang menjadi wilayah sebaran kera dan menimbulkan ancaman yang signifikan dan terus meningkat terhadap kelangsungan hidup jangka panjang populasi kera liar di seluruh dunia. Perdagangan kera yang semula merupakan kegiatan budaya dan murni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini melibatkan perdagangan global bernilai multijutaan dolar yang dijalankan oleh jaringan pelaku kejahatan lintas negara. Tantangannya yaitu mengurai berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan kera sekaligus melaksanakan strategi-strategi yang tidak memperparah ketimpangan yang ada. Volume seri *Negara Kera* ini menggabungkan penelitian dan analisis orisinal, studi kasus terkini, dan praktik terbaik yang mulai diterapkan untuk mendorong agenda konservasi kera yang berkaitan dengan pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan.

“ Dalam upayanya mengatasi ancaman dan bahaya besar terhadap kera besar dan owa di seluruh dunia, Arcus Foundation telah menerbitkan berbagai seri *Negara Kera* yang begitu berpengaruh dan membangkitkan kesadaran mengenai konservasi kera besar dan owa.

Negara Kera membahas kompleksitas antara faktor pendorong manusia demi pembangunan sosial ekonomi dan perjuangan yang terus dilakukan demi kelangsungan hidup semua kera. Sebagaimana pelajaran yang dapat dipetik dari pandemi COVID-19 ini, kita perlu lebih memahami hubungan antara kemanusiaan dan alam. Seri *Negara Kera* memberikan solusi yang dapat meminimalkan dan memitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati dengan cara melaksanakan upaya konservasi melalui kolaborasi, investasi keuangan, kebijakan, dan edukasi. Publikasi ini diperuntukkan bagi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan dan memberikan landasan analitis untuk memengaruhi diskusi, praktik, dan kebijakan dengan tujuan menyelaraskan hubungan antara konservasi kera, kesejahteraan manusia, dan tekanan pembangunan ekonomi dan sosial.

Setiap generasi memiliki tantangannya sendiri. Namun jarang sekali kita diberikan kemampuan untuk senantiasa memengaruhi setiap generasi berikutnya. Kera besar dan owa merupakan mata rantai penting dalam sejarah evolusi dan masa depan kita. Upaya melestarikan spesies ini sebenarnya merupakan aksi menyelamatkan sebagian dari diri kita sendiri.”

Inger Andersen

Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
dan Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB

Foto Sampul

Latar belakang: © Jabrison

Bonobo: © Takeshi Furuichi

Owa: © IPPL

Gorila: © Annette Lanjouw

Orang utan: © Jurek Wajdowicz, EWS

Simpanse: © Nilanjan Bhattacharya/Dreamstime.com

